

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

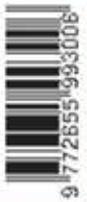
KOMINFO *n*ext



DEWEG INDONESIA 2022

DIGITAL ECONOMY

Edisi 39
Maret 2022



9 772855 993008

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Pentingnya DEWEG-G20 Bagi Perkembangan Global

Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momen yang paling tepat untuk berkontribusi dalam memajukan perekonomian global. Mengusung tema *recover together recover stronger*, ada tiga isu prioritas yang memerlukan tindakan kolektif secara global, yakni mengenai arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Kementerian Kominfo pun hingga saat ini terus melakukan berbagai usaha untuk menyukseskan penyelenggaraan G20.

Sebagai koordinator komunikasi dan media, Kementerian Kominfo terus mendiseminasi berbagai informasi

terkait persiapan dan rencana pemerintah dalam menyambut acara G20. Selanjutnya, sebagai Ketua *Digital Economy Working Group (DEWG)*, Kementerian Kominfo juga kian gencar melakukan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan multi pihak untuk menyukseskan tiga isu prioritas yakni Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19, Literasi Digital dan Kecakapan Digital, dan *Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust*.

Untuk itu, Majalah KominfoNext kali ini kembali hadir di hadapan pembaca dengan sajian khusus tentang tiga isu prioritas tersebut. Pertama, Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19. Selama Pandemi Covid-19, kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital telah memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik. Selain itu, selama pandemi



Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**

juga terjadi pertumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, isu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 menjadi sebuah keniscayaan.

Kedua, Literasi Digital dan Kecakapan Digital. Isu kecakapan digital dan literasi digital diusung agar masyarakat dapat menggunakan ruang digital secara produktif dan mendapatkan nilai tambah. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan SDM merupakan upaya yang terus diperjuangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia digital. Untuk itu, pemerintah memastikan pentingnya inklusivitas dalam teknologi digital agar semua orang di seluruh Indonesia dapat menggunakannya secara positing dan produktif.

Ketiga, *Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust*. Isu ini diangkat menjawab tantangan tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara yang memiliki pendekatan berbeda. Oleh karena itu, melalui DEWG, Kementerian Kominfo berupaya memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk membangun pemahaman bersama keamanan data lintas batas negara.

Ketiga isu tersebut disajikan secara khusus dalam Majalah KominfoNext edisi ini untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang pentingnya DEWG dalam acara G20 mendatang. Oleh karena itu, saya mengajak para pembaca setia KominfoNext untuk turut berpartisipasi dalam kesuksesan G20 mendatang. Mari kita dukung upaya pemerintah agar isu prioritas yang diusung Kementerian Kominfo dalam DEWG-G20 bisa memberikan kontribusi yang positif dan nyata, baik bagi bangsa Indonesia, di tingkat ASEAN hingga ke tingkat global. Selamat Membaca.



**Kementerian
Kominfo juga kian
gencar melakukan
koordinasi, sosialisasi
dan kolaborasi
dengan multi pihak
untuk menyukseskan
tiga isu prioritas yakni
Konektivitas Digital
dan Pemulihan Pasca
Pandemi Covid-19,
Literasi Digital dan
Kecakapan Digital,
dan Cross-Border
Data Flow and Data
Free-Flow with Trust.**



Daftar Isi

6 Kominfopedia

10 Kabar Istana

16 Liputan Utama

42 Gagasan

54 Opini

58 Foto Esai

64 Kabar Covid-19

66 Liputan Khusus

70 Kominfo Daerah

80 Portal Kominfo

88 Lintas Kominfo

Kementerian Kominfo

memperkenalkan

CHAIR & ALTERNATE CHAIR

Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia 2022



Chair
Mira Tayyiba

Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia



Alternate Chair
Dedy Permadi

Staf Khusus Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia





G20

Halo Sobatkom! KominfoNext edisi kali ini akan mengupas tuntas tentang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, perhelatan internasional yang tahun ini dilaksanakan di Indonesia.

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang lahir pertama kali di tahun 1999 atas inisiasi negara-negara anggota G7 (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang). Forum internasional ini menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

Terdapat 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang, hingga negara maju yang tergabung dalam G20, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.

G20 tidak memiliki pemimpin atau ketua tetap. Fungsi presidensi dipegang salah satu anggota selama satu tahun, dan tahun ini Indonesia yang diberi kepercayaan untuk memegang fungsi presidensi G20, setelah estafet kepemimpinan diserahkan dari Italia pada akhir 31 Oktober 2021 lalu.

Penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini diputuskan saat gelaran Riyadh Summit 2020, dan secara resmi dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada akhir tahun 2022.

Begitupun dengan sekretariat, G20 tidak memiliki kantor pusat maupun sekretariat tetap, sehingga koordinasi untuk menjaga kesinambungan dipegang oleh Troika (tiga serangkai) yang terdiri dari negara presidensi berjalan, negara presidensi sebelumnya, dan negara presidensi berikutnya. Anggota Troika G20 saat ini terdiri dari Indonesia, Italia (presidensi sebelumnya), dan India (kandidat presidensi berikutnya).

Lalu, apa saja isu yang dibahas dalam G20? Forum G20 membahas dua arus isu yakni *Finance Track* dan *Sherpa Track*. *Finance Track* merupakan jalur pembahasan dalam forum G20 yang berfokus pada fokus isu keuangan, antara lain kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Pertemuan pada *Finance Track* dihadiri oleh Menteri Keuangan hingga Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara anggota.

Sementara *Sherpa Track* adalah jalur pembahasan dalam forum G20 di bidang-bidang yang lebih luas di luar isu keuangan, antara lain anti korupsi, ekonomi digital, lapangan kerja, hingga isu lingkungan dan energi berkelanjutan. Pembahasan dalam *Sherpa Track* lebih luas, dalam, dan mendetail. Pertemuan dalam jalur ini dihadiri oleh delegasi dari masing-masing negara anggota dalam tiga jenis pertemuan, yaitu pertemuan *working group*, *engagement group*, hingga pertemuan tingkat menteri. Nama "Sherpa" berasal dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit).

Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang tergabung di G20

Amerika Serikat | Kanada | Meksiko | Argentina | Brazil | Inggris | Jerman | Italia | Perancis | Rusia | Afrika Selatan | Arab Saudi | Turki | Tiongkok | Jepang | Korea Selatan | India | Indonesia | Australia | Uni Eropa



Nah, tahukah SobatKom peran Kementerian Kominfo dalam KTT G20 tahun ini? Dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia ini, Kementerian Kominfo dipercaya untuk memegang tugas sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media, sekaligus sebagai pengampu **Digital Economy Working Group**.

Digital Economy Working Group berawal dari pembentukan Digital Economy Task Force (DETF) G20 pada tahun 2017 pada masa Kepresidenan Jerman, yang bertujuan untuk membahas Inisiatif Pengembangan dan Kerja Sama Ekonomi Digital pada masa Kepresidenan Tiongkok tahun 2016. DETF bekerja melalui diskusi dan konsultasi dengan *engagement group* (EG) G20 dan pemangku kepentingan lain.



Lalu, saat Presidensi G20 di Italia tahun 2021, DETF bertransformasi menjadi Digital Economy Working Group (DEWG). Elevasi task force menjadi working group ini digagas oleh Indonesia, sehingga DEWG menjadi *working group* di bidang digital yang pertama kalinya dilaksanakan di KTT G20 tahun ini. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, peningkatan status membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.

DEWG memiliki lingkup tugas membahas pemanfaatan teknologi digital melalui tukar-menukar informasi dan pandangan, serta mencari pemahaman bersama tentang kebijakan yang mendorong ekonomi digital yang tangguh dan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, dengan lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan terhubung, sekaligus memitigasi tantangan dan risiko digitalisasi.

Selanjutnya kita bahas tentang logo G20 Indonesia. Logo G20 Indonesia terdiri dari beberapa elemen grafis yang memiliki makna, antara lain:

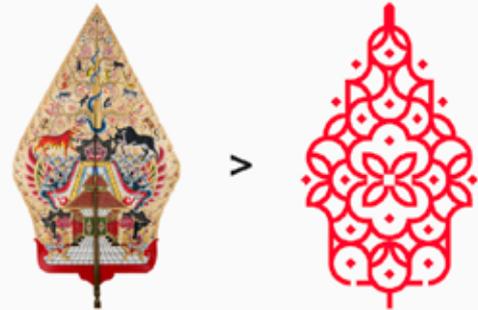
Dalang

'G' pada logo 'G20' ini dibuat seakan mengilustrasikan tangan dalang yang sedang menggenggam wayang. Sebuah enkapsulasi dari penggambaran peranan aktif dalam keberlangsungan suatu cerita. Dalam hal ini, merupakan simbolisasi atas harapan akan upaya untuk memajukan kehidupan perekonomian global yang dapat terkendali dengan baik.



Gunungan

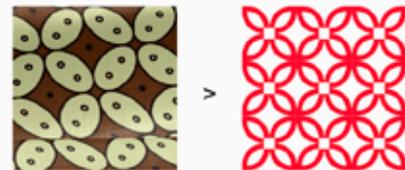
Terinspirasi dari pertunjukan pewayangan, siluet gunung dipilih untuk menggambarkan akhir dari suatu babak. Namun, saat gunung dipegang oleh dalang, akhir dari suatu babak bukan lah akhir dari suatu cerita. Momen ini seperti tanda koma dalam kalimat. Sebuah kalimat bisa memiliki beberapa tanda koma, namun hanya satu titik. Selama gunung masih dipegang oleh dalang, maka cerita belum akan berakhir. Sama seperti harapan kita dalam melalui periode ini. Walau sulit, namun masa ini akan segera terlewati. Mengilustrasikan pengharapan kita untuk segera menyambut babak baru yang akan datang.



Dalam pewayangan, gunung juga merupakan penggambaran keseimbangan kosmos. Tidak timpang antara makro dan mikro. Sama seperti pengharapan kita atas keseimbangan perekonomian global saat ini.

Kawung

Elemen grafis yang mengisi siluet gunung terinspirasi dari motif batik kawung. Motif ini merupakan simbolisasi terjadinya kehidupan manusia. Dalam logo ini, menggambarkan kehidupan manusia yang penuh tekad bulat dan semangat untuk menjadi lebih baik. Bersama saling bahu-membahu dalam mewujudkan perekonomian yang maju dan adil. Terutama untuk bangkit dari situasi yang sulit seperti saat ini.



Arti Keseluruhan Logo

Logo ini menggambarkan peranan aktif kita dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian di babak yang baru. Dengan segala pengharapan atas keseimbangan, serta tekad bulat untuk terus hidup, tumbuh, dan senantiasa menjadi lebih baik dalam memegang kendali di setiap babakannya.



Presiden Jokowi Tak Ingin Indonesia Hanya Jadi Pasar Ekonomi Digital

Kontribusi ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan naik delapan kali di tahun 2030 yaitu di angka Rp4.531 triliun.



Presiden Joko Widodo meresmikan Sea Labs Indonesia di Gedung Pacific Century Place, SCBD, Jakarta, pada Selasa, 1 Maret 2022. Foto: BPMI Setpres/Kris

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital, yaitu diperkirakan mencapai USD146 miliar pada tahun 2025. Kontribusi ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan naik delapan kali di tahun 2030 yaitu di angka Rp4.531 triliun.

Saat meresmikan Sea Labs Indonesia di Gedung Pacific Century Place, SCBD, Jakarta, pada Selasa, 1 Maret 2022, Presiden Jokowi menginginkan agar Indonesia menjadi pemain dalam ekonomi digital tersebut dan tidak hanya menjadi pasar.

“Seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan dua digit di tahun 2021. Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja, Indonesia juga harus menjadi pemain,” ujar Presiden.

Untuk mendukung hal tersebut, Presiden memandang bahwa ekosistem yang kondusif harus dibangun bersama-sama. Selain itu, Presiden juga ingin agar talenta-talenta digital Indonesia, baik di bidang kecerdasan buatan (AI), *cloud computing*, hingga *blockchain*, yang ada di luar negeri diundang untuk kembali ke Tanah Air.

“Saya kira banyak yang anak-anak kita yang ada di luar yang perlu kita undang untuk kembali ke Tanah Air dalam rangka membangun sistem digital kita agar lebih baik,” imbuhnya.

Presiden pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Sea dan Sea Labs Indonesia yang telah mengundang talenta digital Indonesia untuk kembali ke Tanah Air. Bahkan, di tahun 2023 pihak Sea mengatakan akan mengundang sekitar 1.000 talenta digital untuk bisa kembali ke Indonesia untuk masuk di Sea maupun Sea Labs Indonesia.

“Saya kira ini, saya harus mengatakan apa adanya, saya sangat menghargai upaya-upaya yang seperti ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita harapkan bahwa perkembangan ekonomi digital ini bisa juga memicu pemasaran produk-produk UMKM yang seperti tadi saya lihat dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang merata dan berkeadilan,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga berdialog dengan empat talenta digital Indonesia yang berada di luar negeri. Mereka adalah Ainun Najib yang saat ini menjabat sebagai *Head of Analytics, Platform & Regional Business* Grab Singapura, Rangga Garmastewira yang bekerja sebagai *Tech Lead* di SeaMoney Singapura, Chairuni Aulia Nusapati yang bekerja sebagai *software engineer* di Google UK, dan Veni Johanna yang menjabat sebagai *Head of Frameworks Engineering* di Asana Amerika Serikat.

Untuk diketahui, Sea Labs Indonesia merupakan inisiatif Sea yang hadir untuk menumbuhkan industri digital Indonesia dan memberikan



pelatihan intensif bagi talenta digital baru. Melalui kurikulum yang disiapkan oleh pakar teknologi dan digital serta peluang pelatihan kerja, Sea Labs Indonesia akan membangun tim yang terdiri dari 1.000 talenta digital Indonesia terutama *engineer* dan *product manager*, yang akan siap untuk berkontribusi melalui teknologi. Sea Labs Indonesia akan melibatkan guru dan mentor kelas dunia yang berpengalaman untuk berbagi pengetahuan dengan talenta digital Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Chairman & CEO Group SEA Forrest Li, dan COO SEA Ye Gang.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tak-ingin-indonesia-hanya-jadi-pasar-ekonomi-digital/>

Presiden Dorong Percepatan Vaksin Penguat bagi Pekerja Industri di Tanah Air

Hal ini bertujuan agar memberikan perlindungan bagi para pekerja sektor industri sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan dengan baik.

Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kawasan industri di Tanah Air untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 suntikan penguat (*booster*). Hal ini bertujuan agar memberikan perlindungan bagi para pekerja sektor industri sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Presiden saat meninjau program vaksinasi *booster* bagi para pekerja sektor industri di PT Smart Tbk (Sinarmas Marunda Plant Agribusiness and Food), Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 24 Februari 2022.

"Kita ingin sektor produksi kawasan industri semuanya tidak terganggu karena Covid-19, semuanya harus berjalan terus. Produksi jalan terus, ekspor jalan terus sehingga seluruh ekonomi kita bisa berjalan dengan baik," ucap Presiden di lokasi peninjauan.

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan sektor produksi untuk mendapatkan vaksin penguat sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

"Yang paling penting kawasan industri produksinya jangan terganggu. Oleh sebab itu, kita memberikan prioritas kepada sektor produksi agar bisa diutamakan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin *booster*," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berdialog secara virtual dengan sejumlah perwakilan kawasan industri di sejumlah daerah yang melakukan vaksinasi dosis penguat secara serentak. Salah seorang perwakilan dari Kota Medan, Sumatera Utara mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tambahan stok vaksin dari pemerintah dan segera memberikan vaksin tersebut kepada para pekerja.

"Dari 35 ribu karyawan yang ada di Kawasan Industri Medan, kami dapat alokasi 6 ribu paket AstraZeneca dari Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ucap perwakilan dari Kawasan Industri Medan.

Presiden pun menginstruksikan agar stok vaksin tersebut segera dihabiskan agar seluruh pekerja sektor industri di Kota Medan dapat terlindungi dari paparan virus korona.

"Segera dihabiskan yang 6 ribu vaksin itu, kalau habis nanti minta lagi agar vaksin *booster*-nya bisa segera menjangkau ke seluruh industri yang ada di Medan," ucap Kepala Negara.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo, Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, dan Managing Director Sinarmas Ferry Salman. (BPMI Setpres)



“

Kita ingin sektor produksi kawasan industri semuanya tidak terganggu karena Covid-19, semuanya harus berjalan terus. Produksi jalan terus, ekspor jalan terus sehingga seluruh ekonomi kita bisa berjalan dengan baik

”

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-dorong-percepatan-vaksin-penguat-bagi-pekerja-industri-di-tanah-air/>



Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan GWK Cultural Park untuk KTT G20

GWK Cultural Park merupakan salah satu tempat yang akan digunakan untuk acara jamuan makan malam para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung tanggal 15-16 November mendatang.



Presiden Joko Widodo meninjau Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, yang ada di Kabupaten Badung, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022. Foto: BPMI Setpres/Kris

Presiden Joko Widodo meninjau Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, yang ada di Kabupaten Badung, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022. GWK Cultural Park merupakan salah satu tempat yang akan digunakan untuk acara jamuan makan malam para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung tanggal 15-16 November mendatang.

Tiba sekitar pukul 10.30 WITA, Kepala Negara disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Direktur GWK Haryanto Tirtohadiguno, Komisaris Utama GWK SN. Suwisma, Direktur GWK Erwyanto Tedjakusuma, dan Komisaris Utama PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio. Presiden Jokowi bersama para penyambut kemudian berjalan menuju area GWK Cultural Park guna melakukan peninjauan seraya menerima penjelasan dari masing-masing unsur terkait.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dalam keterangannya selepas peninjauan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait rencana menjadikan GWK Cultural Park sebagai lokasi jamuan makan malam KTT G20. Salah satunya terkait perluasan area pintu masuk dan tempat parkir yang memudahkan kegiatan para delegasi.

“Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan arena untuk jalannya, masuknya, kemudian juga nanti pada tempat *entrance* harus dibuat yang agak lebih plong, lebih lebar, sehingga nanti akan lebih memudahkan kepala negara untuk turun dari *drop off* menuju ke tempat *dinner*, kemudian nanti setelah *dinner* kembali lagi untuk dijemput lagi,” ujar Diana.

Selain GWK Cultural Park, Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan penghijauan di sekitar jalan tol yang akan dilintasi para delegasi KTT G20. Menanggapi arahan tersebut, Diana menyebut bahwa Kementerian PUPR akan melakukan penanaman pohon bugenvil di sekitar median jalan tol.

“Di kanan-kirinya itu kita lakukan penanaman-penanaman pohon dan yang lebih pas mungkin itu pohonnya adalah kamboja, ciri khasnya di Bali, dan

juga pohon pandan laut, dan beberapa tanaman perdu agar itu bisa menjadi keindahan juga dari jalan tol tersebut,” ungkapnya.

Diana pun berharap kegiatan penghijauan di sekitar jalan tol tidak hanya dilakukan di Bali, namun juga dilakukan di seluruh jalan tol yang ada di Tanah Air.

“Jalan tol ini juga nanti menjadi percontohan juga kalau misalnya jalan tol itu harus ada penghijauan,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

(BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-joko-wi-tinjau-kesiapan-gwk-cultural-park-untuk-ktt-g20/>





DEWG
INDONESIA
2022 DIGITAL ECONOMY

ACHIEVING A RESILIENT RECOVERY:
WORKING TOGETHER FOR A MORE INCLUSIVE,
EMPOWERING, AND SUSTAINABLE
DIGITAL TRANSFORMATION

CHAIR

DEWG

DEWG

INDONESIA

UNIVERSITAS
INDONESIA

INDONESIA

DEWG

UNIVERSITAS
INDONESIA

DEWG-G20, Kominfo Bahas Tiga Isu Prioritas

Agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 telah dimulai sejak estafet kepemimpinan diserahkan dari Italia kepada Indonesia pada akhir 31 Oktober 2021 lalu. Beragam isu yang akan menjadi fokus pembicaraan di ajang bergengsi tersebut telah mulai dibicarakan di berbagai forum diskusi tingkat nasional. Sejak disahkan sebagai ketua G20, ekonomi digital menjadi salah satu isu prioritas yang diangkat oleh Indonesia dalam forum pertemuan internasional ini. Kementerian Kominfo dipercaya untuk menggawangi Digital Economy Working Group (DEWG) G20 hingga saat ini terus menggaungkan isu tersebut dalam berbagai forum diskusi.

Sepanjang Januari hingga Maret, tema diskusi tentang DEWG berfokus pada tiga isu prioritas, yaitu Konektivitas dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19, Kecakapan Digital dan Literasi Digital, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust. Ketiga isu tersebut telah menjadi bagian dari topik diskusi sepanjang Februari.

Isu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dilatari kondisi terkini, di mana kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan. Meski demikian, Chair DEWG, Mira Tayyiba menegaskan, isu konektivitas digital tidak hanya menyoal tentang pembangunan, tetapi lebih kepada lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pojok Info

Penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 ditetapkan saat gelaran Riyadh Summit tahun 2020 lalu, ketika Presidensi G20 masih dipegang oleh Arab Saudi.



Merespons kondisi terkini dan sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia, maka Kementerian Kominfo yang dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital akan memberikan penekanan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia dan ekosistem digital dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan



Sementara itu, isu prioritas tentang literasi digital dan kecakapan diusung agar masyarakat dapat menggunakan ruang digital secara produktif dan mendapatkan nilai tambah. Di tengah maraknya beragam persoalan di dunia digital, isu literasi digital dan kecakapan digital sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang paham digital.

Pojok Info

Secara resmi, Presidensi G20 Indonesia dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada akhir tahun 2022.

“Urgensi literasi digital ini serupa dengan situasi ketika anak-anak diberikan mainan baru: apakah kita bisa menggunakannya? Maka dari itu, kita harus memastikan inklusivitas dalam teknologi digital, bahwa semua orang dapat menggunakannya,” jelasnya.

Selanjutnya isu ketiga yang menjadi prioritas pembahasan dalam DEWG G20 tahun ini adalah terkait Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust atau Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya. Isu tersebut diusung untuk menjawab tantangan tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara yang memiliki pendekatan berbeda. Dalam isu ini, Indonesia akan memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk membangun pemahaman bersama.

Tiga isu tersebut merupakan prioritas utama yang memayungi beberapa subtopik. Setiap pembahasan subtopik dalam DEWG G20 akan senantiasa berkaitan dengan edukasi literasi digital dan upaya menjaga ruang digital agar pemanfaatan teknologi digital bisa bersih, aman, dan produktif.

“Melalui berbagai upaya di isu prioritas ini, kami pikir bukan saja pemanfaatan digital di Indonesia dan global yang bisa memetik manfaat, tetapi juga banyak sektor lain termasuk sektor pendidikan,” tandasnya.

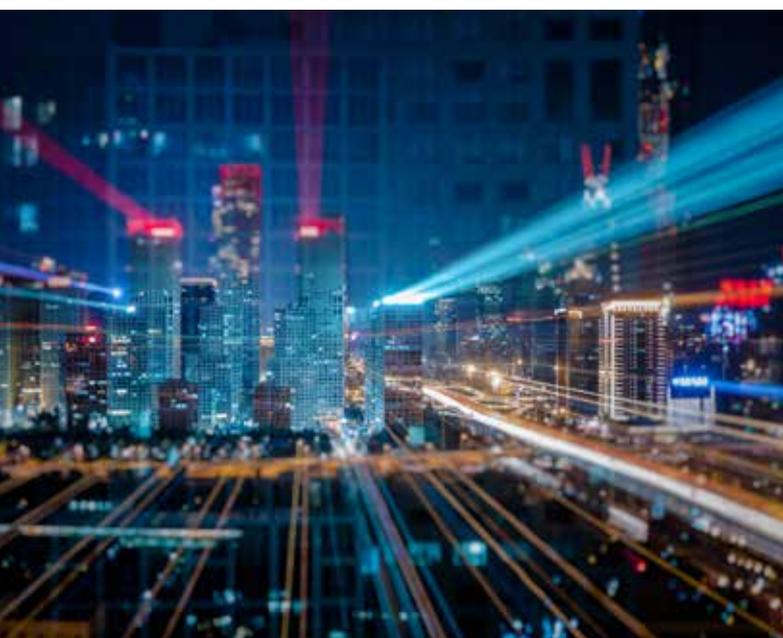


Rangkaian Acara DEWG

Workshop Kelompok Kerja Ekonomi Digital telah digelar pada 8 Maret 2022 yang lalu. Acara tersebut dihadiri oleh National Knowledge Partner Kementerian Kominfo, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Padjadjaran. Selain itu, ada juga National Strategic Stakeholders Kementerian Kominfo. Juru Bicara Menteri Kominfo sekaligus sebagai Alternate Chair DEWG G20 dalam kesempatan itu menyatakan, acara tersebut merupakan bagian dari agenda pertama kelompok kerja ekonomi digital.

Dedy Permadi yang juga menjadi Alternate Chair DEWG G20 menjelaskan, Kementerian Kominfo membuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk memperdalam dan mempersiapkan agenda DEWG G20. Menurutnya, DEWG G20 terdiri dari empat putaran perundingan dalam level working group.

“Kemudian, ada dua kali *workshop* yang dilanjutkan dengan tiga kali *side event* yang terdiri dari Peluncuran Program Nasional Talenta Digital Indonesia, Digital Innovation Network yang dielevasi dari Presidensi Italia sebelumnya, serta Digital Transformation Expo,” jelasnya.



Pada kesempatan itu Dedy juga mengungkapkan, Digital Transformation Expo (DTE) akan menjadi side event dalam acara puncak perundingan DEWG G20. Hal tersebut telah disinggung Presiden Joko Widodo dengan salah satu tujuannya yakni menggelar *deliverable* utama yang konkret mengenai transformasi digital yang berlangsung di Indonesia.



Menurut Dedy, DTE akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2022, bersamaan dengan KTT atau Leaders Meeting atau pertemuan tingkat kepala negara di Bali. Selain menampilkan DTE, Presidensi G20 akan melibatkan komunitas dan perusahaan lokal maupun global untuk menampilkan berbagai macam teknologi.

“Jadi kita akan memiliki acara Puncak Digital Economy Working Group berupa satu acara besar yang namanya Digital Transformation Expo. Expo ini akan menggambarkan betapa dinamisnya dan betapa kuatnya lompatan ekonomi digital Indonesia,” pungkasnya.

Membedah Prinsip Inklusivitas, Memberdayakan dan Berkelanjutan dalam DEWG G20 2022



Geliat terhadap era digital terus mengemuka seiring adaptasi dan penyesuaian dari migrasinya aktivitas masyarakat dari ruang-ruang fisik ke ruang digital. Sudah menjadi rahasia umum bahwa era digital merupakan sebuah keniscayaan. Hari ini, esok, dan seterusnya kita semakin dikenal dengan masyarakat konsumtif. Apapun kebutuhan dan keinginan dapat terjawab dengan cepat dan tepat melalui ekosistem platform digital. Kata “digital” kemudian menjadi akrab dalam kehidupan kita sehari-hari.

Berbagai kebutuhan manusia yang ditopang hampir sepenuhnya oleh teknologi digital pun juga semakin menguat setelah Indonesia dan dunia dilanda pandemi Covid-19. Lebih dari dua tahun beradaptasi dengan wabah pandemi, beragam cara dilakukan agar aktivitas sosial masyarakat tetap pulih dan berkembang. Namun kemudian, pandemi tetap saja melumpuhkan hampir sektor. Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bisa dikatakan menjadi penopang dan garda terdepan dalam upaya pemulihan sektor terdampak, khususnya kesehatan dan ekonomi.

Berangkat dari latar belakang persoalan pandemi yang tak berkesudahan itu, Indonesia mendapatkan mandat mulia sebagai tuan rumah Presidensi G20 tahun 2022. Tidak ingin melewati begitu saja mandat tersebut, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kemudian mengambil langkah-langkah terukur. Dengan mengusung tema, Recover Together, Recover Stronger. Lahirlah tiga isu prioritas utama Presidensi G20 Indonesia 2022, yakni Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital, dan Transisi Energi.

Secara khusus, berbicara mengenai sektor digital, kita akan difokuskan pada isu prioritas utama yang kedua pada Presidensi G20 tahun ini, yaitu Transformasi Ekonomi Berbasis Digital. Dalam isu prioritas itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika didapuk sebagai pengampu forum Digital Economy Working Group atau yang disingkat DEWG.



Apa yang dimaksud DEWG dan kegiatan apa saja yang kemudian akan dilakukan selama berlangsungnya Presidensi G20 Indonesia 2022 akan diulas satu per satu dalam artikel di Majalah Kominfo Next edisi Maret 2022 ini. Sebagai informasi, Kementerian Kominfo mengusung tiga isu prioritas DEWG yang diantaranya Connectivity and Post-Covid Recovery, Digital Literacy dan Digital Talent, dan Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust.

Pojok Info

Riyadh Summit Leaders' Declaration pada Presidensi G20 Arab Saudi 2020 lalu melahirkan berbagai inisiatif penanganan pandemi, termasuk kebijakan injeksi penanganan Covid-19 sebesar 5 triliun USD.



Connectivity and Post-Covid Recovery



Konektivitas dan pemulihan pasca pandemi atau Connectivity and Post-Covid Recovery merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusung oleh Kementerian Kominfo dan mitra strategisnya. Dalam isu prioritas ini, prinsip utama yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai inklusivitas, memberdayakan dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menjelaskan prinsip tersebut bermuara pada pemanfaatan teknologi digital yang dilatarbelakangi oleh kondisi terkini di mana konektivitas dan pemulihan pascapandemi merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan.

“Tidak hanya menyoal pembangunan, tetapi lebih kepada lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Merespons kondisi terkini dan sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia, maka Kementerian Kominfo yang dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital akan memberikan penekanan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia dan ekosistem digital dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan kata Sekjen Kominfo yang juga sebagai Chair DEWG G20 2022 pada kegiatan Sofa Talk Series DEWG di Jakarta, Jumát (11/02/2022).

Kementerian Kominfo yang dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital, akan memberikan penekanan pada aspek infrastruktur, SDM, dan ekosistem digital dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan.



Pojok Info

Kontribusi G20 dalam penanganan pandemi juga mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri bagi negara berpenghasilan rendah, penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, serta pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, hingga obat-obatan.

Selain pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi digital, prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan juga membahas keterkaitannya dengan sektor strategis.

Pada Sofa Talk Series, Juru Bicara Kementerian Kominfo selaku Co-Chair DEWG Dedy Permadi menekankan pada aspek pemanfaatan ekosistem ruang digital yang positif dan produktif yang menjadi salah satu alternatif jawaban atas tantangan pemulihan pascapandemi Covid-19. Sehingga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo melakukan percepatan pembangunan konektivitas digital sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya digital masyarakat yang inklusif.

“Ruang digital bisa menjadi salah satu jawaban untuk pemulihan pascapandemi Covid-19. Makanya tema yang kita usung salah satunya adalah Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19,” tuturnya.

Betapa pentingnya sektor digital dalam menopang aktivitas masyarakat, selama pandemi bahkan terjadi pertumbuhan positif sektor TIK yang menjadi tulang punggung dan satu satunya sektor yang masih tumbuh positif selama tiga kuartal berturut-turut di tahun 2020.

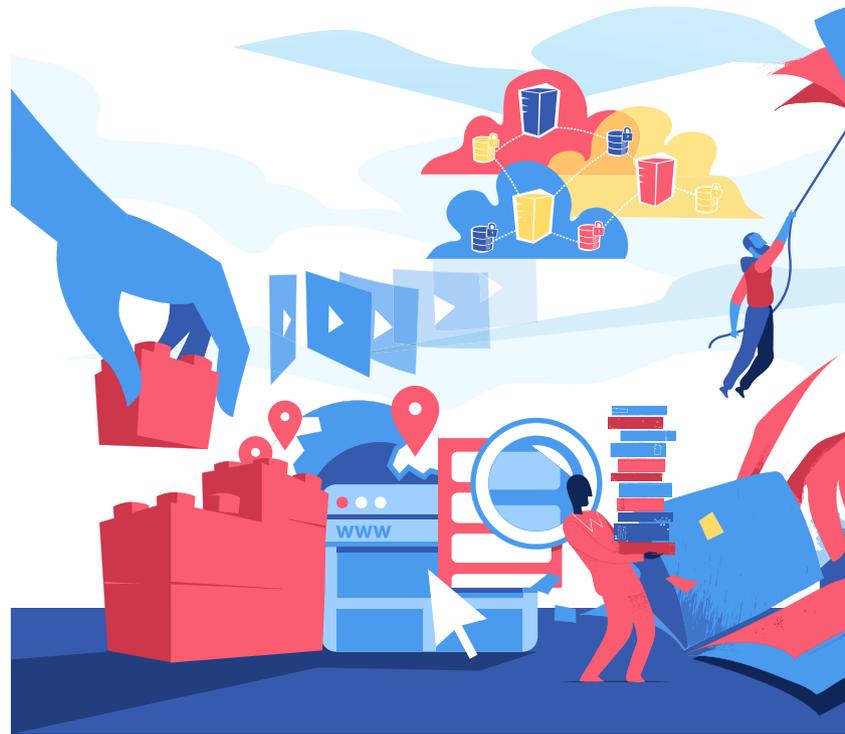
“Ketika sektor lain mengalami perlambatan, kita melihat pertumbuhan 10,58 persen pada waktu itu year on year dan itu terus tumbuh sampai sekarang. Ini menandakan bahwa ruang digital bisa menjadi salah satu jawaban untuk pemulihan pascapandemi Covid-19. Walaupun yang namanya inklusivitas untuk memperkecil kesenjangan di masyarakat kita tidak hanya soal perluasan akses internet saja, tetapi juga manusianya. Jadi kesenjangan itu tidak hanya soal daerah yang ada internet dan yang tidak ada internet, tetapi juga soal orang yang sudah punya internet bisa menggunakan secara positif atau tidak, bisa menggunakan secara produktif atau tidak,” ujarnya.



Konsolidasi Isu Digital

Komitmen menyuarakan isu digital dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 juga terus ditekankan oleh Kementerian Kominfo. Melalui pembukaan 1st Internal Workshop DEWG G20 "Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation. Sekjen Mira Tayyiba menekankan untuk membahas dan mengkonsolidasi isu digital. Terlebih lagi konsolidasi diperlukan untuk mengidentifikasi kesepahaman dan menjawab tantangan dalam sektor digital untuk mewujudkan pemulihan yang tangguh.

Kita ketahui bahwa selama pandemi Covid-19, teknologi digital menjadi penopang kehidupan dan terciptanya solusi inovatif. Oleh karena itu, Indonesia patut bangga karena selama pandemi, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai USD 70 Miliar di tahun 2021 berdasarkan angka Gross Merchandise Value (GMV). Angka tersebut bahkan diprediksi akan meningkat hingga USD 146 miliar pada tahun 2025.



"Selain itu, setidaknya terdapat tambahan 5 startup Indonesia berhasil meraih status unicorn di tahun 2021. Sektor-sektor seperti edutech dan healthtech juga mengalami perkembangan pesat di tengah pandemi. Maka Indonesia patut bangga akan prestasinya, situasi ini juga menggarisbawahi tantangan-tantangan dalam sektor digital, misalnya risiko kesenjangan digital, minimnya kecakapan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital, serta keamanan data dan arus data lintas batas negara yang semakin deras. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengharapkan pembahasan isu digital mencerminkan aspirasi transformasi digital di Indonesia agar bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," paparnya.

Terlepas dari bagaimana pemanfaatan teknologi digital berikut dampak dan tantangannya bagi Indonesia, Menkominfo Johnny G. Plate dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa momentum Presidensi G20 menjadi kesempatan



bersejarah bagi Indonesia menjadi bagian dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global.

“Dalam memantapkan posisi strategis menavigasikan arah perkembangan lanskap perekonomian digital dunia. Selain itu, momentum ini juga penting bagi Indonesia untuk memandu diskusi antar negara dalam isu tata kelola ekosistem digital global,” ujarnya.

Apa yang dimaksud oleh Menkominfo tentunya bermuara pada kegiatan perekonomian digital yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan baik secara valuasi, maupun partisipasi masyarakat sehingga mendorong transformasi digital yang merata. Misalnya di tahun 2022, diperkirakan terdapat 4,9 Miliar pengguna internet dunia termasuk 204 juta pengguna internet di Indonesia. Kemudian, terdapat lalu lintas dan konsumsi data sebesar 64,2 Zettabyte pada tahun 2020 dan diprediksi bertumbuh 3 kali lipat sebesar 181 Zettabyte pada tahun 2025.

Global Data Consumption itu diproyeksikan akan bertambah dengan CAGR sebesar 26,9% sejak tahun 2020 sampai dengan 2025. Demikian yang dijelaskan Menkominfo yang mengutip data Kementerian Perdagangan 2021. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital terus berkembang dengan Gross Merchandise Value sebesar USD70 Miliar Dolar Amerika Serikat pada 2021 dan diproyeksikan sebesar USD 315.5 Miliar pada tahun 2030.

“Pertumbuhan konsumsi data yang besar dan cepat secara masif akan mendorong pembangunan pusat data (cloud computing) dan pertumbuhan ekonomi digital dunia. Pemerintah Indonesia di bawah direktif Presiden Bapak Joko Widodo terus melakukan penggelaran pembangunan infrastruktur hulu digital (*upstream ICT Infrastructure*), baik jaringan tulang punggung Fiber Optic, Microwave Link, High Throughput Satellite dan Base Transceiver Station (BTS) yang merata di seluruh wilayah Tanah Air,” tuturnya.



DEWG-G20, dalam Bingkai Transformasi Digital

Forum Digital Economy Working Group Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 resmi berlangsung. Ini merupakan momentum perdana bagi negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, menjadi pemimpin agenda internasional G20.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam dalam Konferensi Pers Kick Off Meeting DEWG G20 2022 di Grand Hyatt Jakarta Pusat, pada Selasa (15/03/2022) lalu, mengharapkan dukungan dari semua masyarakat dan multipihak terkait agar Presidensi G20 yang diketuai Presiden Joko Widodo mampu mempromosikan prinsip, nilai dan tiga karakteristik transformasi digital untuk mendukung perkembangan ekonomi digital.

Sejalan dengan tema utama Presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, Kementerian Kominfo mengangkat tema besar DEWG "Achieving a Resilient Recovery: Working Together For a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation."

"Tema ini menggambarkan harapan luhur yang hendak dicapai oleh Digital Economy Working Group. Menyuarakan aspirasi untuk membahas isu-isu yang dapat mendukung proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Kita semua berharap,

kita tidak hanya mampu pulih kembali tetapi juga mampu pulih dengan cepat dari tantangan di masa mendatang," jelas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, tema besar DEWG tersebut menekankan tiga karakteristik transformasi digital, yaitu inklusivitas, *empowering*, dan *sustainable*. Inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. *Empowering* menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. Sementara itu *sustainable* mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung Sustainable Development Goals.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri mengangkat tiga isu prioritas digitalisasi yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.





Melalui topik *Connectivity and Post Covid-19 recovery*, Indonesia mengajak bangsa-bangsa dunia untuk mengatasi bersama kondisi ketidakseimbangan pada lanskap transformasi digital, termasuk di dalamnya membahas isu-isu ekonomi digital dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang lebih kuat di skala global.

Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan bahwa topik *Connectivity and Post-Covid-19 Recovery* memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengajak anggota G20, bersama-sama berdiskusi tentang peran sentral konektivitas dalam berbagai lini kehidupan.

"Secara khusus keterkaitannya dengan pemulihan pasca-Covid-19 mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup, yang *fair*, yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital

serta optimalisasi konten dan data internet. Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting itu, sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan lebih inklusif melalui teknologi digital," ujar Menkominfo di Aruna Senggigi Resort and Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (29/3/2022) lalu.

Sementara itu, melalui topik *Digital Skills and Digital Literacy*, Indonesia mengajak negara G20 meningkatkan nilai pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat luas. Sekaligus memfasilitasi penciptaan ekosistem talenta digital yang inklusif di tatanan multilateral. Isu prioritas kecakapan digital dan literasi digital diusung agar masyarakat dapat menggunakan ruang digital secara produktif dan mendapatkan nilai tambah.

Indonesia mendorong pembahasan Digital Skills dan Digital Literacy untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam *digital reskilling* dan *upskilling* masyarakat dunia

Menurut Menteri Johnny, pembahasan Digital Skills and Digital Literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

"Indonesia mendorong pembahasan isu itu untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam *digital reskilling* dan *upskilling* masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital, tutur Menkominfo.

Mengutip data We Are Social dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta penduduk atau sekitar 73,7% dari total populasi. Rata-rata setiap pengguna mengakses internet selama 8 jam 36 menit dalam sehari, atau hampir 9 jam. Itu berarti 37,5% dari 24 jam sehari digunakan untuk berinternet.

Berdasarkan data Kementerian Kominfo per Desember 2021, pemerintah telah memutus akses atau *takedown* sekitar 2,7 juta konten negatif di ruang digital. Hal ini merupakan gambaran dari dampak penggunaan ruang digital yang tidak produktif. Oleh karena itu isu mengenai kecakapan digital merupakan ikhwal yang sangat penting.



Kominfo sendiri melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital terus melakukan pendidikan digital dalam 4 domain yaitu: budaya digital, etika digital, keterampilan digital, dan keamanan digital.

Etika digital berarti kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital atau *netiquet* dalam saat berselancar di dunia digital. Contoh dari etika digital adalah tidak menyebarkan berita bohong dan tidak melakukan perundungan dunia maya.

Budaya digital merupakan hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis teknologi internet. Budaya digital juga dapat tercermin lewat cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi di dunia digital. Salah satu contoh budaya digital adalah aktivitas menggunakan media sosial hingga berbelanja online.

Keterampilan digital berarti kemampuan untuk secara efektif, mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hampir sama seperti budaya digital, salah satu keterampilan digital adalah menggunakan media sosial hingga menggunakan platform belanja online.

Sementara itu keamanan digital adalah aktivitas mengamankan kegiatan digital, salah satunya tercermin lewat penggunaan password hingga pemahaman mengenai OTP dan istilah *cyber security* lainnya.

Kemudian topik ketiga yaitu Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust, Indonesia akan memfasilitasi diskusi arus data lintas batas negara. Termasuk upaya penerimaan penerapan prinsip *lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity*. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong interoperabilitas data dengan membahas tantangan terkait *privacy*, perlindungan data, keamanan data, dan kekayaan intelektual.

Pembahasan ini merupakan respon terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data, serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data.

“Memahami diversifikasi pengaturan yang ada, Indonesia mengambil langkah untuk melakukan pembahasan kebijakan data lintas batas Negara. Pada Presidensi G20 kali ini dengan usulan prinsip arus data lintas negara yang mengacu pada keabsahan, keadilan, keterbukaan atau transparansi, dan timbal balik,” kata Menkominfo.

Pelaksanaan DEWG

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Kick Off Meeting DEWG G20 2022 di Grand Hyatt Jakarta Pusat, pada Selasa (15/03/2022) lalu mengatakan bahwa ketiga isu prioritas digitalisasi tersebut akan dibahas melalui serangkaian agenda *workshop, meeting* dan *side event* DEWG yang berlangsung sepanjang tahun 2022.

Pertama, *workshop* internal pada tanggal 8 Maret sudah dilakukan. Kedua, Kick Off Meeting yang diselenggarakan pada hari ini. Ketiga, Digital Economic Working Group Meetings pertama pada tanggal 29 hingga 30 Maret yang akan diadakan secara online.



Selanjutnya pertemuan DEWG kedua akan berlangsung tanggal 17 s.d. 18 Mei di Yogyakarta. Kemudian pertemuan ketiga tanggal 20 s.d. 21 Juli di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Adapun pertemuan keempat tanggal 22 Juli di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelahnya, akan Pertemuan Tingkat Menteri pada tanggal 29 s.d. 30 Agustus 2022 di Bali.

Pertemuan puncak menteri digital dari negara Anggota G20 menghasilkan Ministers Declaration yang akan mendorong implementasi kebijakan dan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi digital.

Sedangkan keseluruhan acara *working group* dan *engagement group* akan bermuara pada Leaders Meeting yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15- 26 November 2022. Bersamaan dengan penyelenggaraan Leaders Meeting tersebut, Kementerian Kominfo akan menyelenggarakan Digital Transformation Expo sebagai *showcase* perjalanan transformasi digital bangsa Indonesia kepada dunia. Agenda besar transformasi digital Indonesia sendiri termaktub dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang meliputi Infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Agenda Transformasi Digital

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bahwa transaksi e-commerce pada tahun 2022 mencapai Rp530 triliun atau naik 31,4 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp403 triliun.

Salah satu faktor pendorong ialah perubahan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang tercermin dari peningkatan jumlah konsumen digital, seperti *ride hailing*, pesan-antar makanan online, media digital, *online travel*, serta layanan finansial, hingga mencapai 21 juta sejak Januari 2021.

Berkaca pada proyeksi BI tersebut, Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate, saat ini terus mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital.

Demi menciptakan ekosistem digital dan transformasi ekonomi berbasis digital yang inklusif, pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM/UMi), untuk turut serta ke dalam pasar ekonomi digital, di antaranya melalui UMKM Digital On Board serta dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Kementerian Kominfo juga tengah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital. Saat ini sudah ada sekitar 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap *scaling-up* untuk mendukung perekonomian Indonesia.





Tentunya, infrastruktur digital yang memadai akan membuat para pelaku UMKM Indonesia dapat bermigrasi ke *digital onboard* sehingga progres ekonomi digital bisa mencapai target, yaitu 30 juta UMKM digital di tahun 2024.

Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Kominfo pun telah sedang berupaya mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Kementerian Kominfo juga menunjukkan aksentuasi pada pengembangan ekonomi digital ketika bersama-sama dengan komunitas penyelenggara e-dagang atau *e-commerce* menyepakati tanggal 5 Mei sebagai Hari Bangsa Buatan Indonesia. Disposisi Kominfo adalah berpihak pada tumbuh kembangnya produk dalam negeri.

Menteri Johnny juga menyatakan penetapan HBBI menjadi wujud keberpihakan Pemerintah dan ekosistem digital atas hasil karya kreatif anak bangsa, terutama pelaku UMKM. Selain UMKM, Kominfo juga terus mendorong pembentukan startup digital. Hingga November 2021, telah terbentuk 15 Startup digital aktif dari program Startup Studio Indonesia (SSI).

Tentunya penuntasan masalah disparitas infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berbagai program pengembangan ekonomi kreatif

dan digital terus dilakukan, mulai dari pelatihan yang sifatnya *basic*, *intermediate*, hingga *advance*.

Pelatihan tingkat *basic* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar digital masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif.

Selanjutnya pada tingkat *intermediate*, Kominfo menyiapkan program Digital Talent Scholarship (DTS), yang ditujukan kepada mahasiswa, masyarakat umum, profesional, guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan hingga aparatur sipil negara.

Pada tingkat ini, Kominfo menyiapkan sekitar 103 tema. Beberapa di antaranya seperti: *big data analytics*, keamanan siber, kecerdasan buatan alias *artificial intelligence (AI)*, *Augmented Reality (AR)*, dan *Virtual Reality (VR)*.

Kemudian pada tingkat *advance*, Kominfo menyelenggarakan pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang ditujukan pada para pimpinan aparatur sipil negara (ASN) dan swasta, dengan tenaga pengajar dari National University of Singapore, Tsinghua University dan Harvard Kennedy School, dan Harvard University.

Melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) tersebut, Kementerian Kominfo menargetkan 50 juta warga Indonesia terliterasi digital pada 2024.





Komunikasi Publik DEWG G20, Makin Akrab dengan Era Digital



Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 akan menjadi momentum penting dan tercatat dalam sejarah panjang kontribusi Indonesia bagi dunia. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan dasar.

Pertama, pandemi Covid-19 yang dengan cepat mengubah kondisi sosial masyarakat dunia utamanya di sektor kesehatan. Kedua, lemahnya perekonomian yang menjadi ancaman di hampir semua negara karena dampak dari pandemi Covid-19 itu sendiri.

Negara-negara anggota G20 telah lebih dahulu merumuskan gagasan besar dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengatasi pandemi melalui Presidensi G20 Italia 2021 lalu. Namun, pada saat masa-masa pemulihan baik sektor kesehatan, ekonomi dan sektor lain yang ikut terdampak pandemi, Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan momentum yang tepat karena ide, gagasan, dan pemikiran negara anggota G20 disatukan dalam forum-forum tematik.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada saat menerima estafet kepemimpinan sebagai tuan rumah Presidensi G20 2022 dari Italia pada 31 Oktober 2021 lalu, menegaskan komitmen Indonesia kepada dunia melalui tema yang diusung, yakni Recover Together, Recover Stronger, atau Pulih Bersama, Bangkit Perkasa.

Mengejawantahkan tema Presidensi G20 Indonesia 2022, pemerintah kemudian memetakan tiga prioritas utama yakni Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital, dan Transisi Energi. Dari tiga prioritas utama, prioritas kedua yakni transformasi ekonomi berbasis digital, menempatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu *Digital Economy Working Group* (DEWG). Working group ini telah dan akan terus melakukan berbagai kegiatan hingga pertemuan para menteri bidang digital, serta G20 Summit saat pertemuan antara pimpinan negara anggota G20 di Provinsi Bali pada November 2022 nanti.



Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo Rhina Anita menyatakan, strategi komunikasi publik dalam rangka memasifkan informasi kepada seluruh masyarakat terkait penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 dan khususnya DEWG terus dilakukan. Untuk DEWG, Kementerian Kominfo telah memulai rangkaian kegiatan sejak memasuki tahun 2022.

Sepanjang awal tahun 2022, Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo menyebutkan salah satu kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi DEWG G20 yang dilakukan adalah Sofa Talk, sebuah kegiatan diskusi daring yang menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba selaku Chair DEWG, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi selaku Alternate Chair DEWG, serta mitra strategis dari National Knowledge Partners dan National Strategic Stakeholders.

Sofa Talk Series pertama diselenggarakan tanggal 26 Januari 2022 dengan tema Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20. Kedua, tanggal 11 Februari 2022 membahas isu prioritas pertama, Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19. Sofa Talk ketiga,, tanggal 18 Februari 2022 membahas isu prioritas kedua, Kecakapan dan Literasi Digital. Keempat, tanggal 25 Februari 2022 membahas isu prioritas ketiga, Arus Data Lintas Negara. Sofa Talk terakhir digelar tanggal 4 Maret 2022 dengan tema Rangkaian Agenda Isu Digital dalam Presidensi G20 Indonesia.

Kepala Biro Humas Rhina Anita menjelaskan tema kegiatan Sofa Talk Series kedua, ketiga, dan keempat merupakan tiga isu prioritas dalam DEWG G20. Oleh karena itu, sosialisasi tiga isu prioritas tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai rangkaian kegiatan.



Kick Off Meeting DEWG G20

Kementerian Kominfo memastikan penyelenggaraan DEWG yang melibatkan ekosistem mitra digital di Indonesia terus dilakukan. Rhina Anita menyatakan, tanggal 8 Maret 2022 telah berlangsung 1st Internal Workshop DEWG G20 'Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation'.

Seusai berlangsungnya Workshop I DEWG, Chair DEWG Mira Tayyiba dan Alternate Chair DEWG Dedy Permadi, menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, dinyatakan bahwa

Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate mengajak pemangku kepentingan untuk melahirkan *legacy* mengenai tata kelola ekonomi digital global. Hal itu dilakukan dengan memperkaya agenda dalam *Digital Economy Working Group* (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.

Kementerian Kominfo membuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk memperdalam dan mempersiapkan agenda DEWG G20. Seperti diketahui bahwa DEWG G20 terdiri dari dua kali *workshop*, empat kali perundingan dalam level *working group*, kemudian tiga kali *side event* yang terdiri dari Peluncuran Program Nasional Talenta Digital Indonesia, Digital Innovation Network yang dielevasi dari Presidensi Italia sebelumnya, serta Digital Transformation Expo.

Kepala Biro Humas Rhina Anita menyatakan, rangkaian kegiatan DEWG kembali digelar tanggal 15 Maret 2022 melalui Kick Off Meeting dan Pre-Meeting Workshop. Dalam kegiatan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate menekankan Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum penting bagi negara anggota G20, untuk membahas transformasi digital di dunia yang lebih inklusif. Dalam forum DEWG, pemerintah akan menjembatani diskusi dan berbagi pengalaman antar negara anggota G20.

"Melalui DEWG G20, Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara *emerging nations* dan saling berbagi pengalaman, membagikan *lesson learned* yang telah dilakukan di negara masing-masing. Sehingga ada suatu pemahaman bersama sebagai standar yang akan menjadi model atau potensi standar yang kita gunakan secara bersama-sama di tingkat global," ujar Menteri Johnny.

Melalui forum DEWG G20, Menkominfo menegaskan bahwa momentum ini akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meninggalkan *legacy* melalui kesepakatan-kesepakatan di meja perundingan G20 dari Indonesia untuk dunia.

Usai digelarnya rangkaian kegiatan *Workshop I* serta *Kick Off Meeting* dan *Pre-Meeting Workshop* DEWG, Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo menjelaskan terdapat tahapan kegiatan lainnya yang akan terus dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik baik dengan melibatkan mitra media massa hingga komponen masyarakat secara umum terus dilakukan.

Sebagai masyarakat majemuk dalam bingkai nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tentu bangga dan memastikan ikut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan Presidensi G20 Indonesia, khususnya pada forum DEWG. Dengan menyuarakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya kita semakin dekat dan semakin akrab dengan era digital. Mari sukseskan DEWG G20 2022.



THERE ARE WA



DEWG-G20,

Indonesia Dorong Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Global Berbasis Data

WAYS TO GET THERE



Pertemuan pertama kelompok ekonomi digital G20 telah berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat Indonesia dari 29 Maret hingga 30 Maret 2022. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda kegiatan *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang akan berlangsung sepanjang Presidensi G20 Indonesia.

Selain itu, pertemuan pertama DEWG G20 2022 juga merupakan wadah untuk mendalami diskusi yang telah dibangun terkait pemanfaatan kekuatan teknologi digital untuk mencapai pemulihan yang semakin kuat, memberdayakan, inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konferensi pers pada Selasa (29/3/2022), Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengungkapkan, secara garis besar pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi terkait isu prioritas DEWG-G20 yang telah dilaksanakan pada *pre-meeting workshop season*, 15 Maret 2022 yang lalu.



Memahami diversifikasi pengaturan yang ada, Indonesia mengambil langkah untuk membahas kebijakan data lintas batas negara dengan usulan prinsip arus data yang mengacu pada *lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity*



Menurut Menteri Johnny, substansi diskusi dalam *1st Meeting DEWG-G20* akan mendasari agenda pembahasan pada *The Second DEWG Meeting* yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada 17-18 Mei 2022 mendatang. Hasil diskusi dari pertemuan tersebut akan menjadi *building block* bagi berbagai macam isu digital yang semakin relevan dalam berbagai sektor dan mendorong tata kelola kehidupan baru yang lebih bersifat data sentris.

“Relevansi data pada berbagai sektor dapat diamati melalui tingkat konektivitas global merujuk kepada jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan IP atau *Internet Protocol* yang diprediksikan akan meningkat 3 kali lipat dari populasi global pada tahun 2023 berdasarkan data dari Cisco pada tahun 2020 lalu. Situasi ini semakin terintensifikasi pula oleh pembuatan dan replikasi tata Global yang diprediksikan akan meningkat sebesar 23% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025,” ujar Menteri Johnny.

Menteri Johnny pun mengungkapkan bahwa di tahun 2030, potensi pada sektor ekonomi diperkirakan akan mencapai nilai *gross merchandise value* (GMV) sebesar 315,5 miliar dolar AS.

Oleh karena itu, menurutnya, sebagai Presidensi G20, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi dari lanskap ekonomi digital global yang semakin data sentris untuk memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian di tanah air.

“Untuk dapat mengoptimalkan potensi digital, pemerintah Indonesia melalui Kominfo

mengangkat 3 isu prioritas yang dibahas dalam rangkaian pertemuan DEWG. Pertama *Connectivity and Post-Covid-19 Recovery*, kedua, *Digital Skills and Digital Literacy*, dan ketiga, *Data Free Flow with Trust and Cross Border Data Flow*,” ungkapnya.

Melalui topik *Connectivity and Post-Covid-19 Recovery*, jelas Menteri Johnny, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengajak anggota G20 berdiskusi tentang peran sentral konektivitas digital di berbagai lini kehidupan.

“Secara khusus keterkaitannya dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19 mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup, yang *fair level of playing field*, yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital serta optimalisasi konten dan data internet,” tuturnya.

Untuk itu, pada momen tersebut, Menteri Johnny mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting tersebut sebagai wujud upaya pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan lebih inklusif melalui teknologi digital.

Lebih lanjut, terkait topik kecakapan digital dan literasi digital, Menteri Johnny menjelaskan, isu tersebut juga memiliki peran sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

“Indonesia mendorong pembahasan isu ini untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digital *reskilling* dan *upskilling* masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan isu prioritas ketiga mengenai *Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow*, Menteri Johnny mengungkapkan, hal itu merupakan respons terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data.

“Memahami diversifikasi pengaturan yang ada, Indonesia mengambil langkah untuk melakukan pembahasan kebijakan data lintas batas negara



pada presidensi G20 kali ini dengan usulan prinsip arus data lintas negara yang mengacu pada keabsahan (*lawfulness*), keadilan (*fairness*), keterbukaan (*transparency*) dan timbal balik (*reciprocity*,” imbuhnya.

Untuk itu, Menteri Johnny mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan rangkaian acara DEWG dalam presidensi G20 Indonesia, guna menghasilkan *deliverables* yang konkret dan bermakna bagi ekonomi digital global.

“Mari bersama kita mengawal semangat Presidensi G20 Indonesia dalam menyongsong pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. *Recover together, recover stronger*,” ajaknya.

Pertemuan pertama DEWG-G20 yang berlangsung secara *hybrid* tersebut dihadiri oleh delegasi negara anggota G20, empat *Global Knowledge Partners* DEWG yakni *International Telecommunication Union* (ITU), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta tiga *Knowledge Partners*, yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Universitas Padjadjaran (UNPAD).







Smart City dan IKN Nusantara

JH Phillip Gobang

Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik

Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan IKN. BAPPENAS mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri.

IKN Nusantara tengah dirancang untuk menjadi *sustainable city* atau kota berkelanjutan dengan mengimplementasikan konsep *smart city*. Sebab, IKN Nusantara tidak hanya akan menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan bertumpu pada pembangunan sosial berkelanjutan.

Cardullo dan Kitchin mendefinisikan *smart city* sebagai kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif (Iqbal, 2021). Implikasinya, *smart city* dapat lebih meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat dan ekosistem yang ada dalam lingkup *smart city* tersebut.



Dalam kesuksesan *smart city* di IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara masif terus melakukan pembangunan infrastruktur digital. Salah satunya adalah dengan mendorong pembangunan infrastruktur digital 5G.

Untuk itu, Kementerian Kominfo tengah melaksanakan pemetaan kebutuhan kapasitas jaringan *backbone* maupun jaringan akses/*last mile* di IKN Baru yang meliputi infrastruktur penunjang perangkat aktif dan perangkat pasif untuk implementasi layanan *fixed broadband* dan *mobile broadband*.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah menyatakan bahwa Kementerian Kominfo akan terus bekerjasama dengan otoritas yang ditunjuk membangun tata kelola IKN Nusantara menjadi ibu kota cerdas, *smart capital city*, ibu kota yang didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik.

Kominfo juga telah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN Nusantara berdasarkan *masterplan* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Desain tersebut sesuai hasil koordinasi antara Kementerian Kominfo dengan pihak terkait dalam rangka penyiapan layanan telekomunikasi menggunakan teknologi 5G untuk mendukung layanan publik dan penerapan *Smart City* di IKN Nusantara.

Kementerian Kominfo pun terus menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak global untuk penerapan teknologi 5G, khususnya untuk pengembangan kota pintar dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Indonesia baru mengenalkan secara komersial jaringan 5G pada Mei 2021, di mana Telkomsel menjadi pelopor yang membawa sinyal seluler generasi kelima itu ke masyarakat. Kini ada operator yang mengantongi 'restu' pemerintah lainnya, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison dan XL Axiata. Setelah peluncuran komersial jaringan telekomunikasi 5G tahun 2021 lalu, operator telekomunikasi telah memulai operasi awal di 13 kota di Indonesia. Bahkan, pemerintah sedang mempersiapkan spektrum frekuensi radio untuk pemerataan jaringan 5G.

Dalam kunjungan kerjanya ke Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan penerapan teknologi terbaru di IKN Nusantara menjadi kota pintar alias *smart city*.

Saat ini Indonesia telah sedang membuka kerja sama implementasi 5G dengan berbagai pihak, satu yang diujai dengan Huawei.

Vice President Huawei untuk Kawasan Asia-Pasifik, Jay Chen sendiri beberapa waktu lalu mengatakan Indonesia merupakan salah satu mitra paling strategis Huawei dengan perkembangan ekonomi dan transformasi digital yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia, menurut Chen, berada di jalur cepat adopsi teknologi 5G, di mana implementasi dan penggunaannya secara penuh dapat menjadi game-changer dan solusi mendasar, baik untuk kota pintar, tata kelola, transportasi, sektor pertambangan, atau perawatan kesehatan.





Indonesia berada di jalur cepat adopsi teknologi 5G, di mana implementasi dan penggunaannya secara penuh dapat menjadi *game-changer* dan solusi mendasar, baik untuk kota pintar, tata kelola, transportasi, sektor pertambangan, atau perawatan kesehatan

Untuk itu ia mendukung penuh implementasi transformasi digital Indonesia melalui *support system* 5G yang telah dikembangkan sejak 2009 lalu.

Vice President Huawei untuk Kawasan Asia-Pasifik juga menyatakan akan terus berkontribusi untuk memberikan nilai tambah ekosistem digital Indonesia, melalui penguatan infrastruktur 5G dan Cloud, penyiapan talenta digital, dan inisiatif lain.

Dampak Ekonomi

BAPPENAS dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. BAPPENAS menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik BAPPENAS memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37% (BAPPENAS, 26 Juni 2019).

Di sisi lain, rencana pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional. Diperkirakan akan ada kenaikan inflasi sebesar 0,2% selama proses perpindahan IKN. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok (liputan6.com, 26 Juni 2019).



Profil Singkat

Nama:
JH Phillip Gobang

Jabatan:
Staf Khusus
Menkominfo
Bidang Komunikasi
Politik

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) memberikan arahan kepada Gubernur se-Indonesia pada seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN Nusantara dengan mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa gubernur se-Indonesia.





DEWG G20 Indonesia 2022

1st Internal Workshop

Suasana 1st Internal Workshop DEWG G20 “Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation”, yang berlangsung *hybrid* dari Jakarta Pusat, Selasa (08/03/2022).



1st Internal Workshop

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba selaku Chair DEWG G20 dalam sambutannya menjelaskan bahwa *Digital Economy Working Group* (DEWG) menginisiasi *melting pot* antara Working Group (WG), Engagement Group (EG), National Knowledge Partner, dan National Strategic Stakeholders. Pelaksanaan 1st Internal Workshop ini juga akan menjadi pengejawantahan peran DEWG sebagai *leading sector* untuk isu prioritas Digital Based Transformation dalam Presidensi G20 Indonesia.

1st Internal Workshop

Dedy Permadi selaku Alternate Chair DEWG G20 menjelaskan Kementerian Kominfo membuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk memperdalam dan mempersiapkan agenda DEWG G20.



1st Internal Workshop

Perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) selaku National Strategic Stakeholders, serta perwakilan Universitas Indonesia selaku National Knowledge Partner turut hadir dalam Internal Workshop DEWG Indonesia 2022, Selasa, (08/03/2022).





Pre-Meeting Workshop

Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Chairman *Digital Economy Working Group* (DEWG) G20 hadir secara langsung dalam Pre-Meeting Workshop DEWG G20 Indonesia 2022, didampingi Chair of DEWG 2022 Mira Tayyiba dan Alternate Chair DEWG 2022 Dedy Permadi, Selasa (15/03/2022).



Pre-Meeting Workshop

Foto bersama dengan seluruh peserta Pre-Meeting Workshop yang hadir secara virtual, yang meliputi Organisasi EU dan 10 perwakilan negara peserta.



Kick Off Meeting

Opening Ceremony *Kick Off Meeting Digital Economy Working Group G20* yang ditandai dengan membunyikan Angklung Digital. Hadir dalam *Kick Off Meeting* tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kominfo; Johnny G. Plate, Chair of DEWG 2022; Mira Tayyiba, Alternate Chair of DEWG 2022; Dedy Permadi, serta jajaran Eselon I Kementerian Kominfo dan Kemenko Marves.

Kick Off Meeting

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan momentum Presidensi G20 Indonesia menjadi kesempatan bersejarah bagi Indonesia untuk menjadi bagian dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan *Kick Off Meeting Digital Economy Working Group (DEWG)* di Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).





Kick Off Meeting

Menkominfo bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi saat mengikuti sesi Diskusi *Kick Off Meeting* DEWG G20 2022. "Melalui DEWG G20, Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara *emerging nation* dan saling berbagi pengalaman, membagikan *lesson learned* yang telah dilakukan di negara masing-masing. Sehingga ada suatu pemahaman bersama sebagai standar yang akan menjadi model atau potensi standar yang kita gunakan secara bersama-sama di tingkat global," kata Menteri Kominfo.



Kick Off Meeting

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi turut bergabung secara virtual dalam sesi Diskusi *Kick Off Meeting* DEWG G20 2022.



Kick Off Meeting

Suasana pelaksanaan konferensi pers yang dihadiri sejumlah awak media dari media elektronik, cetak, serta media online. "Kita harapkan Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan *legacy* yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama," ujar Menkominfo.

CARA MENDAFTAR RUANG BUKU KOMINFO

1



Kirimkan *email* dan Nama ke *Email* : perpustakaan@mail.kominfo.go.id dengan subjek "Pendaftaran Ruang Buku Kominfo".

2



Akan ada email balasan dari Perpustakaan Kominfo berupa *username/email* dan *password* (paling lambat 1 x 24 jam hari kerja).

3



Unduh Ruang Buku Kominfo di Playstore/Appstore.

4

Masukan *email* dan *password*.



5

Klik buku yang ingin anda pinjam dan klik pinjam.



6

Selamat menikmati layanan Ruang Buku Kominfo.



7

Sobatkom juga bisa mengusulkan koleksi judul *e-Book*, berikut nama pengarang (optional), ke *email* perpustakaan@mail.kominfo.go.id dengan subjek Usulan Koleksi *e-Book* Ruang Buku Kominfo.

KOLEKSI RUANG BUKU KOMINFO



RUANG BUKU KOMINFO

MARI GEMAR MEMBACA



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Pangkas Birokrasi: Apakah **Profesionalisme ASN** Sebatas Di Atas Kertas?

Farida Dewi Maharani

Pranata Humas Ahli Madya - Koordinator Media Cetak
Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP

Salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya adalah melakukan efisiensi birokrasi dengan cara memangkas proses birokrasi yang berjenjang. Hal ini disampaikan saat pidato pertamanya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Sidang Paripurna MPR, pada tanggal 20 Oktober 2019. Jokowi menilai salah satu penghambat investasi dalam negeri adalah proses birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit, sehingga kala itu diharapkan eselonisasi pada instansi pemerintahan yang melakukan pelayanan ke publik hanya cukup sampai eselon 2 dan eselon 1.

Hal ini bisa dipahami agar pelayanan cepat maka birokrasi perlu dipangkas, agar gerak Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih lincah. Sejalan dengan itu, secara bertahap melalui Kementerian Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemda Daerah segera untuk mengimplementasikan program prioritas "efisiensi birokrasi" ini. Peralihan ini tentu saja ini tidak semudah yang dibayangkan meskipun efisiensi birokrasi ini sudah mulai didengungkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Di awal sosialisasi gejolak di internal ASN terjadi di mana-mana, banyak hal yang di mata ASN belum terjelaskan dengan pasti soal nasib menjadi JFT. Namun sejalan dengan waktu gejolak yang muncul di internal ASN, dengan sendirinya meredup satu persatu kementerian dan lembaga mengimplementasikan kebijakan efisiensi ini.



Kini, semua struktural ASN adalah seseorang dengan jabatan fungsional tertentu. Tidak hanya itu, agenda membuat ASN lebih profesional lebih dahulu dimulai dengan penerimaan CPNS berbasis pada kebutuhan JFT di setiap kelembagaan, artinya dari awal masuk ASN diminta untuk memilih profesi bidang keminatan yang akan ditekuni. Maka dapat dikatakan bahwa ke depan setiap ASN mengemban tugas sesuai “kekhususan yang dipilih”.

Di periode transisi, ASN yang menjabat suatu kedudukan struktural eselon 3 dan 4 secara otomatis berpindah sebagai jabatan tertentu sesuai dengan jabatan struktural yang diemban terakhir. Setuju tidak setuju, ASN harus menerimanya jika tetap ingin mendapatkan keistimewaan “penyetaraan angka kredit”. Terkesan memaksakan? Benar, dalam kondisi seperti ini model barter seperti ini cukup *fair*, sambil berjalan semua pihak saling berbenah.

Jika menilik ke belakang cukup beralasan kebijakan ini diambil Presiden melalui Menteri PANRB. Pertama, berbelitnya birokrasi tidak dapat mengimbangi kecepatan dan dinamisnya perubahan di masyarakat. Pemerintah melalui ASN dituntut untuk dapat irama gerak publik dalam segala aspek. Kedua, berbelitnya birokrasi menyebabkan pelayanan publik tidak optimal. Mimpi Presiden agar pelayanan publik tidak lagi dihitung dalam ukuran bulan dan minggu namun diukur dalam hitungan jam. Berdasarkan alasan ini, birokrasi harus dibuat lebih *simple* agar dapat berlari cepat.

Lantas bagaimana implementasinya saat ini? Dalam proses masa transisi ini muncul masalah ketidak sinkronan antara kepentingan tujuan organisasi dan kepentingan individu terjadi. Ini terjadi dalam fokus tujuan, bukan pada bagi habis pekerjaan yang harus diturunkan dari tujuan organisasi. Jika sebelum menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN dapat fokus kepada tujuan organisasi, saat ini ketika ASN adalah seorang JFT maka ada kepentingan pribadi yang harus dipertahankan.

Hal ini dipicu kewajiban ASN untuk dapat mengumpulkan angka kredit agar dapat memperoleh hak naik pangkat dan mempertahankan tunjangan kinerja. Logikanya, yang ingin dibangun adalah profesionalitas PNS diukur berbasis pada kinerjanya. Yes, setuju,

idealnya ASN menerima *take home pay* mereka sesuai kinerja, bukan bagi rata tunjangan tapi beban tidak merata. Sama seperti buruh konveksi yang diberikan upah sesuai produk yang bisa diselesaikannya, misal menyelesaikan 4 potong baju maka dibayarkan seharga empat potong baju, bukan menerima sama dengan buruh yang bisa menyelesaikan 10 potong baju.

Namun kenyataan di lapangan, profesionalitas PNS diukur dengan kecukupan nilai DUPAK yang terkumpul. DUPAK sendiri adalah Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit berupa formulir usulan yang memuat data rincian kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat fungsional. Dalam DUPAK sendiri tidak hanya mencantumkan daftar rincian saja, tapi wajib untuk menyertai bukti fisik bahwa memang butir kegiatan tersebut benar-benar dikerjakan oleh seorang ASN. Artinya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional mewajibkan mayoritas ASN sebagai jabatan fungsional tertentu untuk rutin berijbaku dengan DUPAK dan bukti fisik yang sifatnya sangat administratif.

**...birokrasi harus
dibuat lebih
simple agar dapat
berlari cepat.**



Indeks Profesional ASN

Kita coba tilik kembali dengan aturan lain yang mengatur terkait profesionalitas ASN. Mengacu kepada peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa standar profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 diperjelas bahwa setiap dimensi dalam standar profesionalitas ASN harus memiliki bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari standar profesionalitas ASN.

Kemudian kita coba lihat bagaimana syarat administratif DUPAK yang diwajibkan bagi pegawai JFT apakah sinkron dengan dimensi kinerja yang tertuang dalam peraturan BKN No 8 Tahun 2019.

Dalam peraturan BKN tersebut, Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dalam DUPAK sendiri mencoba menerjemahkan definisi ini dengan sangat administratif sekali yang hanya seolah menggambarkan "hasil" perorangan namun belum secara matang mempertimbangkan target, capaian dan manfaat pada instansi. Kenapa? Karena untuk dapat mengklaim angka kredit dan membuktikan "hasil" tersebut ASN JFT harus berijibaku dengan berkas-berkas disposisi, surat tugas dan format standar buku pedoman JFT.

Ketika ditengok lebih dalam angka kredit dari setiap poin pekerjaan utama pun sangat sangat kecil sekali, kisaran 0.01-0.08 atau paling tinggi di tingkat madya 0.15. Bisa dibayangkan berapa banyak bukti yang dikumpulkan ketika seorang JFT ditargetkan dalam 1 tahun mengumpulkan angka kredit minimal 35. Dan berapa lama waktu yang harus diluangkan untuk mengumpulkan bukti-bukti angka kredit tersebut. Apakah target, capaian, hasil harus dibuktikan sangat administratif? Mungkin akan lebih efektif jika pembuktiannya tidak perlu jelimet sehingga tuntutan profesionalitas ASN bisa difokuskan pada tujuan organisasi.



Profesionalitas yang Tersandera

Amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional sebenarnya sangat mulia, inovatif, dan sesuai tuntutan zaman yang membutuhkan kecepatan pelayanan pemerintah, hanya saja dalam implementasi pengukuran JFT perlu ditinjau kembali.

Tinjauan implementasi ini menjadi penting, minimal dengan mempertimbangkan hal yang sangat mendasar: (1) Pengerjaan pelaporan DUPAK yang terlalu *rigid* tentu akan memakan waktu cukup lama, maka waktu ASN akan terpotong untuk memikirkan dan membuat bukti fisik DUPAK; (2) Produktivitas ASN apakah akan maksimal ketika harus mengejar target organisasi dan target pribadi dalam waktu bersamaan. Di saat mengejar tujuan perusahaan yang membutuhkan konsentrasi tenaga dan pikiran, di saat bersamaan juga JFT harus menguras konsentrasi dan pikiran untuk membuat laporan bukti fisik.

Belum lagi ritme bekerja di pemerintahan saat ini terus didorong untuk lebih cepat dalam melayani publik, setiap pribadi ASN JFT harus

wajib mengikuti ritme tersebut tapi sayang harus tersandera dengan pelaporan bukti fisik yang administratif. Ibarat orang yang hendak berlari cepat namun ada beban di kaki yang membuat orang tidak bisa berlari.

Hal yang sangat manusiawi, ketika setiap ASN JFT berpikir "selamatkan diri masing-masing", karena sekeras apapun ASN bekerja untuk tujuan instansi di mata hukum tidak dapat diakui jika unsur-unsur ketetapan dalam hukum tersebut tidak dipenuhi. Bayangkan apa yang terjadi ketika dalam suatu organisasi masing-masing individu bekerja sendiri untuk memenuhi target pelaporan DUPAK dan angka kredit. Target profesionalitas ASN dalam pelayanan akan sulit dicapai, implementasi saat ini jauh panggang dari api, karena target profesionalitas saat ini hanya sebatas administratif diatas kertas. Belum lagi mengejar dimensi profesionalitas ASN lain berupa kompetensi dan kualifikasi tentu juga akan sulit dipenuhi oleh seorang ASN JFT. (*FDM)

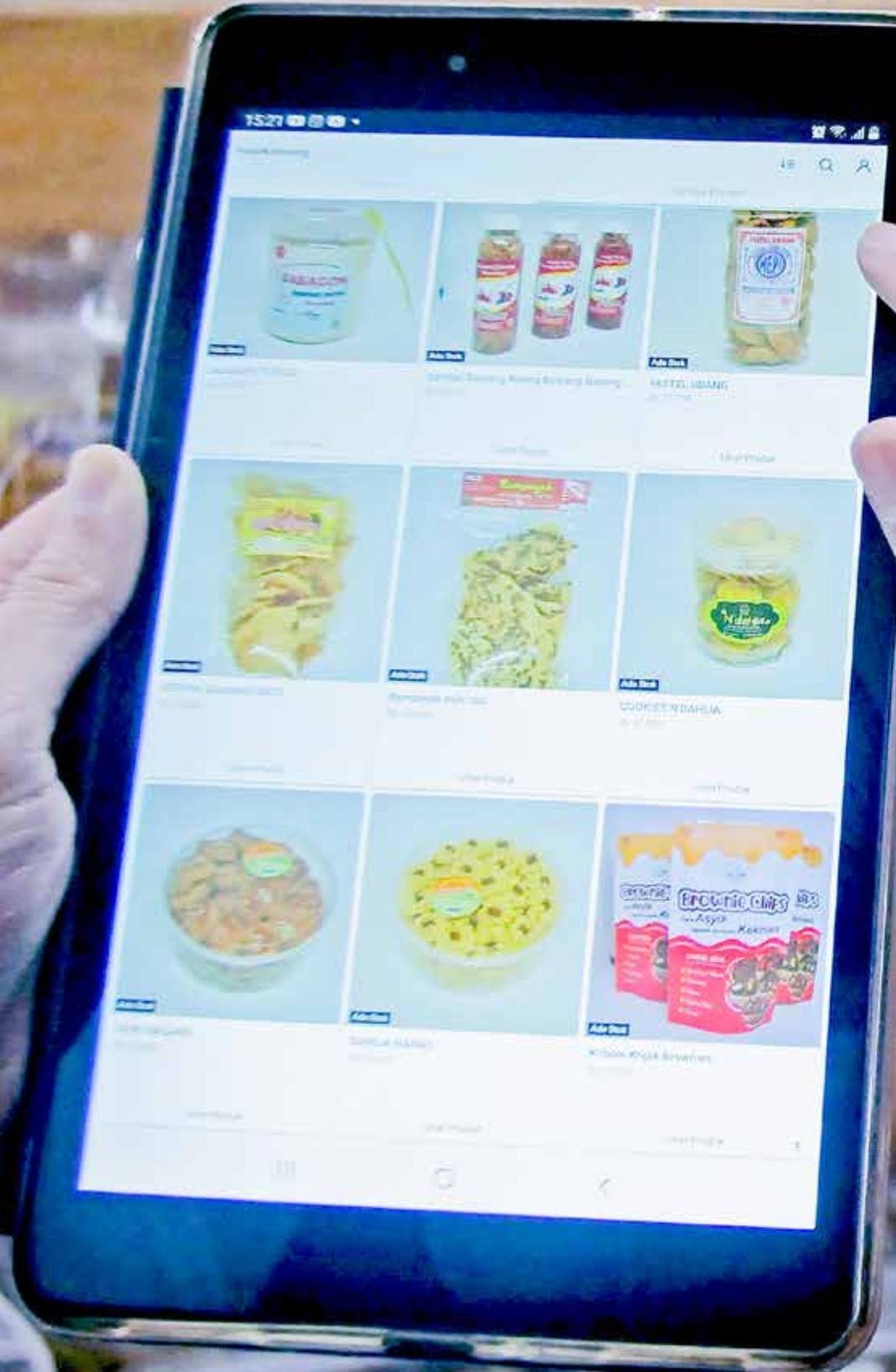
Ibarat orang yang hendak berlari cepat namun ada beban di kaki yang membuat orang tidak bisa berlari

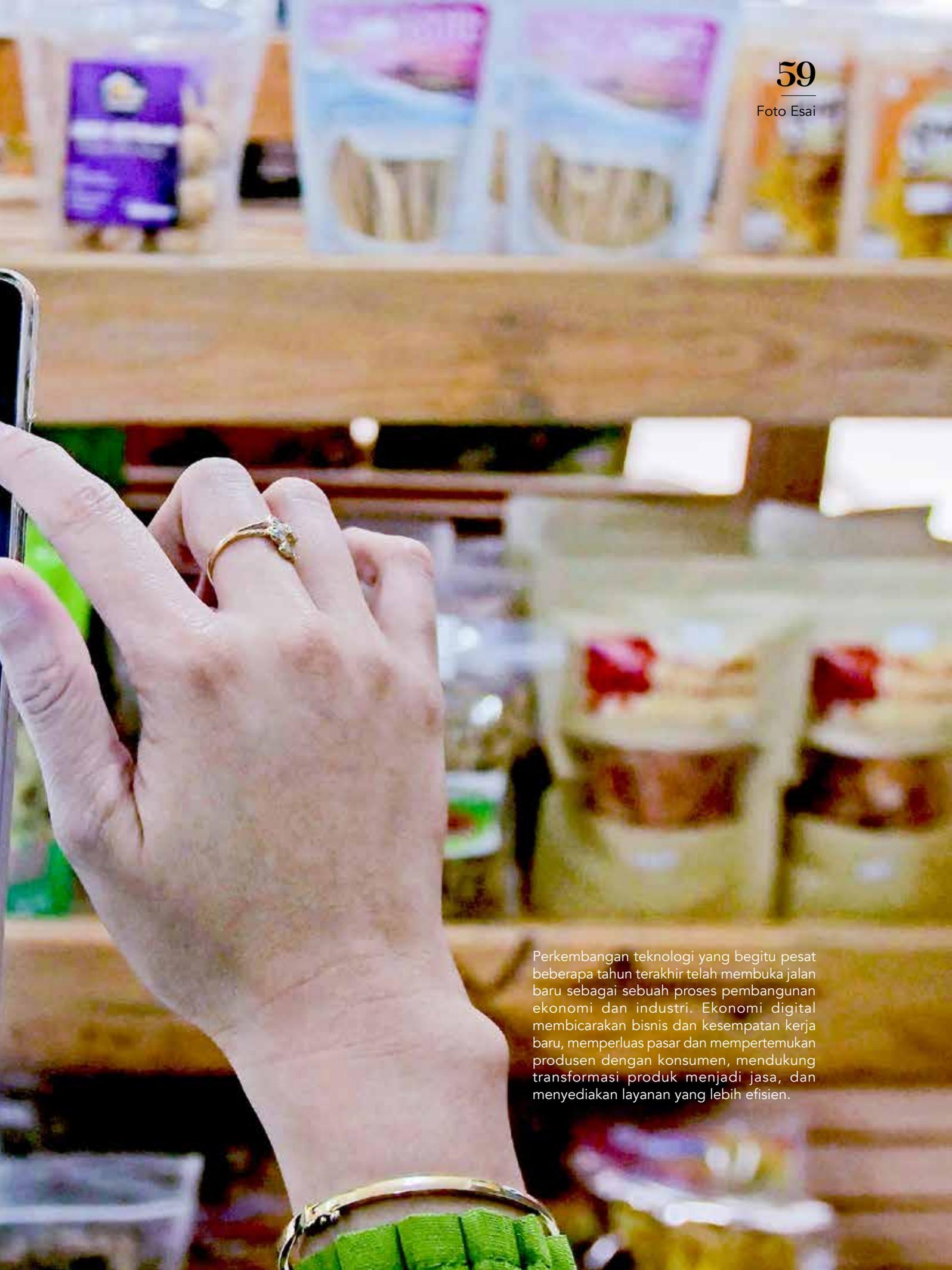


Profil Singkat

Nama:
Farida Dewi Maharani

Jabatan:
Pranata Humas Ahli Madya
I Koordinator Media Cetak
Direktorat Pengelolaan Media
Ditjen IKP





Perkembangan teknologi yang begitu pesat beberapa tahun terakhir telah membuka jalan baru sebagai sebuah proses pembangunan ekonomi dan industri. Ekonomi digital membicarakan bisnis dan kesempatan kerja baru, memperluas pasar dan mempertemukan produsen dengan konsumen, mendukung transformasi produk menjadi jasa, dan menyediakan layanan yang lebih efisien.



Ekonomi digital mengacu pada ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital, sebagai pelaksanaan kegiatan usaha melalui pasar berdasarkan pada internet dan *world wide web*. Semakin banyak masyarakat yang melakukan usahanya dengan ekonomi digital maka akan mengakibatkan pertumbuhan bagi ekonomi nasional.

Ekonomi digital berarti membicarakan bisnis dan kesempatan kerja baru, memperluas pasar dan mempertemukan produsen dengan konsumen, mendukung transformasi produk menjadi jasa, dan menyediakan layanan yang lebih efisien.

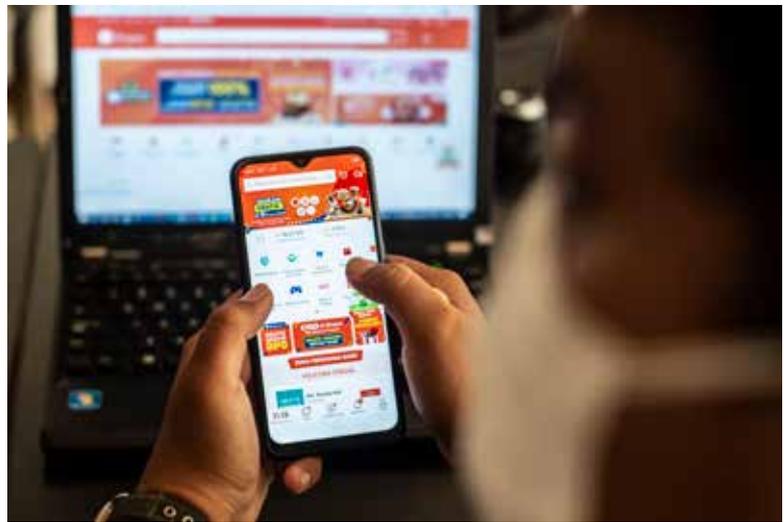


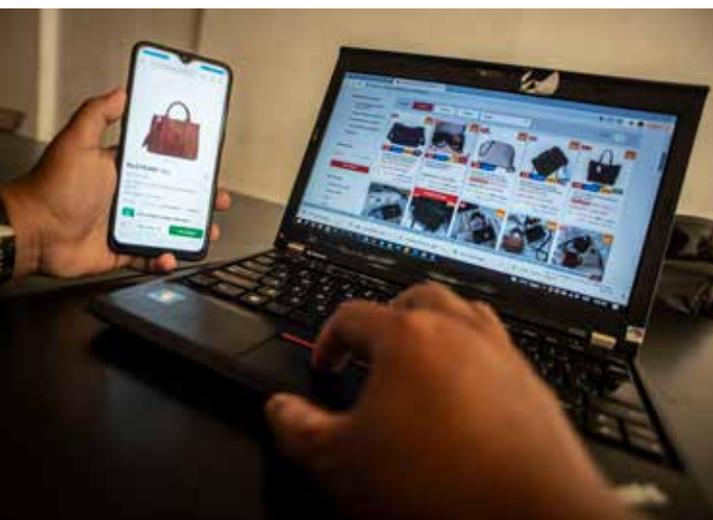
Kewirausahaan dan UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi. Ekonomi digital Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di ASEAN. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tersebut, terdapat sejumlah hal yang harus ditingkatkan, antara lain infrastruktur telekomunikasi serta perlindungan konsumen digital.





Digital Economy Working Group (DEWG) merupakan kelompok kerja di bawah Sherpa Track G20 yang pertama kalinya berlangsung di bawah Presidensi Indonesia. DEWG ditujukan untuk membahas kerjasama konektivitas digital, kewirausahaan digital, pengurangan kesenjangan kecakapan digital, serta aliran data.





Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus mengalami perkembangan pesat. Menteri Johnny menilai DEWG Presidensi G20 Indonesia akan menjadi kesempatan bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bagian dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global.



Kasus Positif Covid-19 Menurun, 3 Tanggung Jawab Utama Jadi Kunci

Perkembangan kasus positif nasional turun 64% dari puncak dengan trennya 3 minggu berturut-turut. Ketika puncaknya, mencapai 390 ribu per minggu, kini penambahannya 140 ribu per minggu, atau turun 250 ribu kasus. Kabar baik lainnya, penurunan terjadi di seluruh Provinsi. Minggu lalu saja, tidak satu provinsi pun penambahannya lebih besar dari minggu sebelumnya,” jelas Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (17/3/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sejalan itu, tren kasus aktif konsisten menurun selama 2 minggu berturut-turut, hingga kini turun 52% dari puncak yang sempat mencapai titik tertingginya 580 ribu kasus per 24 Februari lalu. Sementara, per 16 Maret lalu, kasus aktif 280 ribu. Namun, jumlah ini jauh lebih tinggi hingga 3,5 kali lipat dibandingkan pada 1 Februari lalu atau sebelum lonjakan kasus.

Keberhasilan menekan lonjakan kasus ini harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat, serta pentingnya 3 tanggung jawab utama dan kesadaran masyarakat sebagai kunci pengendalian kasus.

3 Tanggung Jawab Utama

Dalam masa adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat menjadi kunci pengendalian kasus. Dimana terdapat 3 (tiga) tanggung jawab utama yang harus selalu diperhatikan oleh masyarakat. Pertama, disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Hal ini harus diperkuat, mengingat turunnya *testing* mempengaruhi kemampuan membedakan orang positif apalagi kasus tanpa gejala. Hal ini dapat menjaga kasus tetap rendah dan mempertahankan produktivitas ekonomi.

Kedua, kesadaran tinggi untuk dites. Tanpa kesadaran yang tinggi, bukan tidak mungkin orang positif berbaur dan menulari lebih banyak orang, termasuk kelompok rentan. Untuk itu, masyarakat disarankan tes COVID-19 apabila merasa bergejala, atau selepas beraktivitas dengan risiko penularan tinggi. Seperti perjalanan jarak jauh dan kunjungan ke tempat keramaian dengan interaksi intens.

Ketiga, kesadaran tinggi mengisolasi diri jika tidak sehat atau terdiagnosa positif. Upaya bersama disiplin protokol kesehatan dan *testing*, akan sempurna seiring orang positif mengisolasi diri. "Mari kita sadari bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, mencuci tangan, serta melakukan tes dan mengisolasi diri jika positif, merupakan jaminan keberlanjutan produktivitas masyarakat. berani jujur, sehat" imbau Wiku.

Pemerintah juga mulai melakukan pelonggaran perjalanan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 mengenai perjalanan orang di dalam negeri, yang berlaku mulai 8 Maret 2022. Salah satu ketentuannya, masyarakat yang sudah di vaksinasi dosis dua atau tiga tidak wajib menyertakan hasil tes antigen atau PCR.

Namun masyarakat diimbau untuk tetap berperilaku aman saat di perjalanan. Seperti memastikan kondisi tubuh fit, jika tidak maka tunda dulu perjalanan. Bagi yang baru kontak erat, segera lakukan tes dan melakukan skrining melalui PeduluLindungi.

Sumber: covid19.go.id



Hadapi Tantangan di Papua,

Ini Beragam Upaya BAKTI Wujudkan Akses TIK Merata



Di tengah upaya pemerintah menggelar pemerataan jaringan telekomunikasi untuk menghadirkan konektivitas digital nasional di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T), terdapat berbagai tantangan. Baik kondisi geografis hingga penolakan dari kelompok tertentu di wilayah pembangunan. Rabu, 2 Maret 2022 lalu, terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap sembilan pejuang telekomunikasi di Site Repeater B3 (CO 53M 756085 9585257), Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif, mengisahkan sebelum peristiwa telah terjadi longsor sehingga mengakibatkan tower yang dibangun BAKTI bersama PT Palaparing Timur Telematika selaku mitra KPBU roboh. Ketika Pemerintah berusaha membangun kembali tahapan untuk penyusunan (*setting-setting*) tower di tempat kejadian untuk bisa beroperasi kembali, terjadilah penyerangan sebagaimana informasi yang telah diberitakan di media-media.

"Atas kejadian itu, saya mengucapkan belasungkawa untuk keluarga yang terpaksa ditinggalkan. Delapan korban dan satu penyintas Pahlawan Telekomunikasi dalam peristiwa tersebut merupakan rekan-rekan pekerja yang bertugas *re-build* kembali tower di sana," ucapnya usai Konferensi Pers Penunjukan Pemenang Proyek Hot Backup Satellite, yang berlangsung secara virtual dari Media Center Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (11/03/2022).

Menurut Dirut Anang, dengan adanya kejadian di Papua, Pemerintah tak akan menyurutkan niat dalam memerjuangkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses telekomunikasi secara merata.

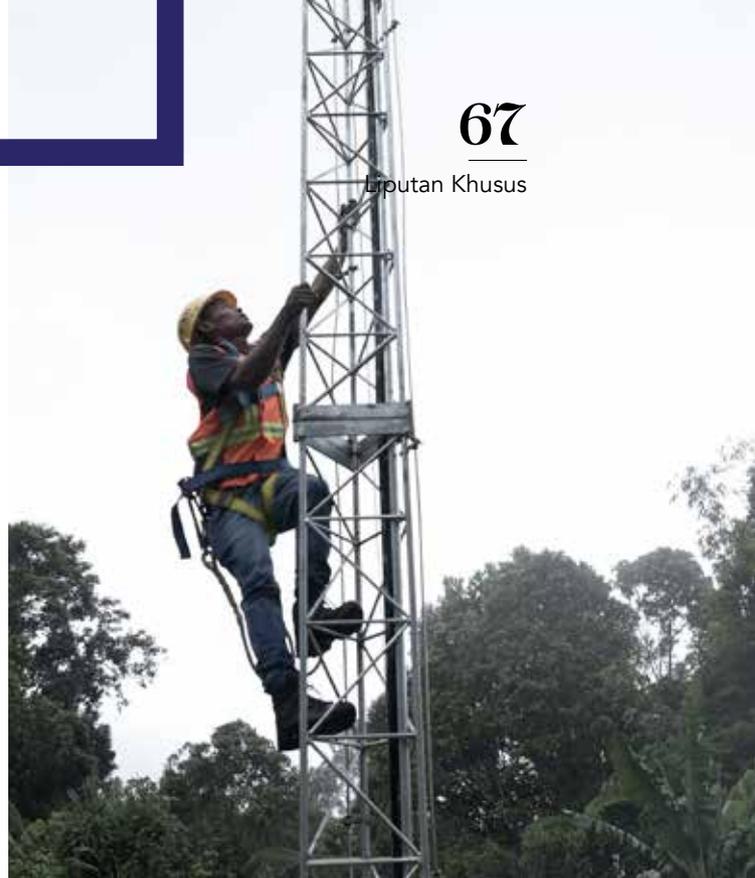
Oleh karena itu, proses pengamanan, pengawalan petugas keamanan, menjadi penting. Bahkan, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo sudah melakukan koordinasi dengan aparat terkait untuk membantu bagaimana proyek pembangunan site repeater tetap berjalan.

“Tentunya proses pengawalan dari pihak-pihak keamanan (Polri dan TNI) menjadi penting. Nah bagaimana upaya pembangunan selanjutnya di Papua, memang persoalan ini tentunya sudah dibahas atau didiskusikan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Polri, TNI. Tentunya proyek infrastruktur TIK ini harus tetap berjalan karena Pemerintah sudah menargetkan hingga 2024 akan terjadi pembangunan yang cukup masif, khususnya di Papua baik pada *level last-mile* maupun *middle-mile*, dan tingkat *backbone*,” ungkap Direktur Utama BAKTI.

Selain itu, pemerintah tentunya mewajibkan adanya asuransi untuk setiap pekerja yang melakukan pembangunan di manapun di wilayah Indonesia untuk program-program BAKTI.

Dirut Anang mengaku, dari segi kondisi geografis pembangunan infrastruktur TIK di Papua memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan lokasi lainnya. Namun demikian, BAKTI Kominfo tidak akan berhenti di sini. Dia menilai, Papua sendiri merupakan lokasi yang paling *challenging* di Indonesia, karena banyak desa-desanya terpisah antara bukit-bukit pegunungan tanpa dihubungkan dengan struktur dasar jalannya.

Oleh karena itu, menjadi tugas BAKTI dalam mengupayakan semua cara termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemerintah Daerah hingga ke pemerintahan tingkat desa agar konektivitas yang inklusif bisa tergelar dalam periode 2022 hingga 2024



“Kami mendengar di lapangan bahwa situasinya cukup menantang karena adanya lokasi yang dipisahkan, sehingga hanya bisa diakses melalui udara yaitu melalui helikopter atau pesawat di mana ketersediaannya ini sangat terbatas. Kami berkoordinasi secara intensif dengan pemda dengan para penyedia layanan transportasi bagaimana target ini bisa terpenuhi hingga akhir bulan ini,” Direktur Utama BAKTI.

“

Tentunya proyek infrastruktur TIK ini harus tetap berjalan karena Pemerintah sudah menargetkan hingga 2024 akan terjadi pembangunan yang cukup masif, khususnya di Papua baik pada *level last-mile* maupun *middle-mile*, dan tingkat *backbone*

”

BTS

Papua *Existing*

Dirut Anang mengungkapkan, pembangunan infrastruktur TIK secara masif dari sisi hulu juga perlu didukung dengan kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memanfaatkan sisi hilir.

Di Provinsi Papua, Kominfo melalui BAKTI telah membangun 213 BTS *existing* 4G dan 244 BTS *existing* 4G di Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2021 ini sedang berjalan, dan tahun 2022 nanti (akan tuntas untuk semua wilayah)," paparnya.

Melalui pembangunan TIK di sisi hulu itu, Dirut BAKTI Kementerian Kominfo meminta Pemda Papua dan Papua Barat dapat memanfaatkannya dengan benar. Ia menyatakan, Kominfo siap memberikan pendampingan.

Sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan layanan telekomunikasi merata, BAKTI Kominfo menargetkan dari bulan Maret tahun lalu hingga diperpanjang 31 Maret tahun ini, membangun 4.200 desa yang terhubung dengan akses internet.

"Namun demikian, tentunya kami menyiapkan rencana cadangan andaikan waktu yang disiapkan ini belum bisa tercapai sehingga seluruh lokasi (4.200 desa) tetap bisa terlayani," jelas Dirut Anang.

Bahkan, guna memperkuat jaringan yang sudah ada BAKTI juga tengah menyiapkan Program Palapa Ring Terintegrasi. Nantinya, proyek ini akan mengintegrasikan bagaimana jaringan yang ada di Papua akan terhubung secara lebih sempurna dengan jaringan-jaringan dengan Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur.

"Juga bisa menjadi jaringan cadangan bila di satu wilayah jaringannya terputus seperti di wilayah Papua misalnya, sehingga pemanfaatan internet akan lebih maksimal," kata Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.





Ketentuan Lahan

Kecepatan penyelesaian program ini, lanjut Dirut BAKTI Kementerian Kominfo, juga sangat ditentukan oleh Pemda dalam menyiapkan lahan untuk keperluan tersebut. Menurutnya, karena kerjasama inilah banyak program BAKTI bisa selesai.

“Jadi memang untuk membangun BTS, kami memerlukan sebuah lahan. Tanpa adanya kerja sama ini tentunya tidak mungkin tower dibangun tanpa lahan dari Pemda. Pemilihan skenario-skenario tanpa harus memiliki lahan, karena proses pengadaan lahan tentunya kalau itu dimiliki secara langsung akan memiliki kompleksitas dalam proses pengadaannya.

Berdasarkan pengalaman BAKTI Kominfo sebelumnya dalam membangun lebih dari 1.600

“

..tentunya kami menyiapkan rencana cadangan andaikan waktu yang disiapkan ini belum bisa tercapai sehingga seluruh lokasi (4.200 desa) tetap bisa terlayani.

”

lokasi, menurut Dirut Anang, inilah skema terbaik yang bisa ada. Namun demikian, masih ada beberapa Pemda yang memiliki harapan berbeda-beda.

“Banyak juga Pemda yang sangat antusias, bahkan kecepatan penyediaan lahannya itu jauh lebih cepat daripada kecepatan proses pembangunan kita sendiri. Tetapi, ada juga Pemda yang memang responnya tidak secepat yang kami harapkan,” ujar Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

Mengenai kriteria lahan yang diperlukan, Dirut Anang menyampaikan untuk ukuran luas areanya sebesar 20 x 20 atau 400 M2. Ia menyontohkan lahan itu perlu cukup kuat untuk membangun sebuah tower, misalnya tidak bisa dibangun di rawa, harus mendapatkan sinar langsung dari Matahari, serta listrik dari penyiapan Tower BTS sepenuhnya (100%) menggunakan solar panel.

“Saya melihat ada beberapa Pemda yang memang menaruh lokasinya di bawah pohon atau mereka tidak menyiapkan lahan sesuai persyaratan, sehingga bisa terima sinar matahari secara langsung. Jadi, inilah pentingnya komunikasi antara pihak BAKTI dengan pihak Pemda untuk menyelaraskan kebutuhan dan *supply*-nya bisa cocok supaya keduanya bisa saling diuntungkan,” tandasnya. (hm.ys)



Layani Umat,
Menkominfo Dorong
Gereja Berinovasi dan
Beradaptasi dengan

Teknologi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mendorong gereja untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat sekitar. Pasalnya, pembatasan mobilitas, aktivitas fisik akibat Covid-19, serta disrupsi teknologi telah mengubah cara hidup bermasyarakat, cara berkomunikasi hingga cara mengakses dan mencari sumber informasi.

“Dampak Covid-19 memicu disrupsi atau perubahan fundamental dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas yang menuntut dunia untuk bergerak secara akseleratif. Hal itu terlihat dari lahirnya teknologi *cloud computing, internet of things, artificial intelligence, big data analytics, advance robotic*, hingga *virtual reality*. Bahkan saat ini *metaverse* yang telah mewarnai semua aktivitas manusia secara global, termasuk kita di Kupang,” ujar Menkominfo saat memberikan sambutan pada penutupan Sinodal Keuskupan Agung Kupang di Gereja St Maria Assumpta, Kota Baru Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (23/02/2022).

Menurut Menteri Johnny, perkembangan globalisasi terus berlangsung secara dinamis dalam waktu-waktu tertentu, berjalan dengan

sangat cepat, dan terus meningkat. Begitupun dengan sekat-sekat ruang, waktu, yang selama ini membatasi komunikasi dan informasi, dipersatukan kembali berkat adanya teknologi.

“Rangkaian disrupsi itu menandai perubahan besar yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Ini Katedral, tetapi karena ini sidang para pastor, saya perlu sampaikan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, mudah-mudahan menjadi catatan-catatan kaki tambahan (*footnote*),” ujarnya.

Menkominfo menyatakan, saat ini dunia mempunyai karakteristik globalisasi. “Dimana berlangsung keadaan yang semakin kompleks saling terkait baik itu di bidang ekonomi, budaya, hukum sosial, psikologi, teknologi, lingkungan bahkan politik,” tandasnya.

Dengan bantuan teknologi digital, globalisasi juga ditandai dengan arus informasi yang selama ini terdistraksi oleh keterbatasan aksesibilitas. “Menjadi bebas, *real-time*, lebih dekat, sangat transparan,” tutur Menkominfo.

Peluang sekaligus Tantangan

Menghadapi fenomena disrupsi ini, gereja tampaknya perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan teknologi digital. “Bahkan lebih dari itu, teknologi digital perlu diadopsi, diadaptasi dan diimplementasikan dalam karya-karya pastoral,” kata Menteri Johnny.

Selain mengadopsi teknologi digital, karya-karya pastoral pun perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat atau ekonomi umat.

“Saya kira ini sudah diketahui semua. Umat yang berdaya dan mandiri, tentu akan menopang pula kemandirian gereja. Inilah peluang sekaligus tantangan kita,” jelas Menkominfo.

Selain itu, gereja dan perangkat-perangkat pastoralnya perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan demi efisiensi, serta efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan gereja perlu memainkan peran sebagai fasilitator dan penangkal terhadap dampak buruk dari penyalahgunaan komunikasi dan informasi.

“Agar tidak terpapar hoaks, disinformasi, misinformasi, bahkan malinformasi. Kita tidak saja berhadapan dengan pandemi Covid-19, tetapi juga infodemi,” ungkap Menkominfo.

Menghadapi perubahan-perubahan yang membawa peluang sekaligus tantangan tersebut, gereja perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika peradaban baru tersebut.

“Dalam kerangka besar transformasi digital, kami, saya bersama rekan-rekan di Kementerian Kominfo mengorkestrasi berbagai pelatihan-pelatihan digital,” ucap Menteri Johnny.

Bahkan, Kementerian Kominfo membangun ICT *Infrastructure*, menyiapkan regulasi, menatakelolakan sumber daya digital yang dikenal dengan spektrum frekuensi. Namun, Indonesia, juga Umat Keuskupan Agung Kupang, membutuhkan kesiapan talenta-talenta digital.

“Kami menyiapkan program-program pelatihan *digital* di tiga level kecakapan *basic digital*, *intermediate digital skill*, dan *advance digital* melalui berbagai program baik dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan *global technology company*,” jelas Menteri Johnny.

Selain itu, Kominfo turut bekerjasama dengan universitas top dunia di antaranya National University of Singapore, Oxford University, Tsinghua University, Harvard Kennedy School untuk menghasilkan *digital talent*, menghasilkan master, mentor digital.

“Programnya disediakan atas biaya negara. Yang dibutuhkan hanya satu, kemauan. Saya mengajak umat Keuskupan Agung Kupang untuk mengambil bagian terhadap program di untuk menghasilkan *digital talent*, Indonesia *Digital Talent Nusa Tenggara Timur*,” ajaknya.



Jalankan Tugas sebagai *Enabler*

Di dalam Presidensi G20 Indonesia, *Digital Economy Working Group* yang dikomandoi atau dipimpin oleh saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, juga menempatkan 3 prioritas isu besar dunia terkait dengan digital.

Pertama, yang berkaitan dengan konektivitas. Melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK di negara masing-masing termasuk Indonesia, termasuk untuk di Kupang.

Kedua, yang berkaitan dengan Post Covid-19 *Recovery* di berbagai aspek kehidupan. Juga yang berkaitan dengan digital literasi dan digital skills yang tadi saya sebutkan.

Kedua program ini mudah-mudahan bisa diadopsi di dalam kebijakan-kebijakan Keuskupan Kupang. Kami melaksanakan tugas-tugas sebagai *enabler*, namun manfaat *digital downstream* hanya bisa dinikmati oleh masyarakat apabila dua hal itu betul-betul dilakukan dengan baik.

Isu yang ketiga yakni *cross-border data flow* dan *data free flow with trust*. "Saya kira ini penting, karena berkaitan dengan kedaulatan negara (*sovereignty*), berkaitan dengan geopolitik, geostrategis yang nanti menjadi masukan bagi para pemimpin dunia," tandas Menkominfo.

Kisah Masa Remaja

Kepada Umat Gereja St Maria Assumpta Kota Baru Kupang NTT dan Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang, Menteri Johnny mengaku bahwa Misa Pontifical yang ia ikuti pagi itu telah membawanya menerawang dan mengingat kembali memori dan kesan akan lebih atau sekitar 50 tahun yang lalu, sewaktu dididik di usia remaja sebagai Siswa Seminari Pius ke-12, di salah satu desa Manggarai Timur.

"Yaitu lagu-lagu Gregorian yang luar biasa. Terima kasih pada paduan suara. Saya masih bisa



Kami menyiapkan program-program pelatihan digital di tiga level kecakapan *basic digital, intermediate digital skill, dan advance digital* melalui berbagai program baik dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan *global technology company*



menghafal seluruh teksnya tadi. Saya berterima kasih dan ini memberikan gambaran pendidikan di seminari yang luar biasa itu," ucapnya.

Meski tidak berjubah seperti sebagian besar yang berada dalam Katedral ini, Menkominfo menyatakan dirinya diberi dan dikaruniai tugas lainnya, dipercayakan oleh negara untuk memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Yang saat ini mendapat tugas untuk membantu negara, masyarakat, dan bangsa kita melaksanakan akselerasi transformasi digital. Pagi-pagi tadi jam dua saya *take off* dari Jakarta, secara khusus untuk menghadiri *Misa Pontifical* hari ini. Sedianya saya ingin datang ke Kupang sehari lebih awal, namun karena kemarin harus beberapa jam mendampingi Bapak Presiden dan menjumpai utusan khusus Pangeran Albert dari Monako dalam kaitan dengan tugas-tugas saya tentunya, maka pagi buta sekalipun saya memohon izin kepada istri saya untuk datang ke sini. Ternyata, izin saya diberi rahmat dan berkah," ungkapnya.

Menteri Johnny menuturkan, hari ini, selain merayakan hari jadinya yang 75, tahun 2022 sekarang juga merupakan tahun Pelayanan Imam Gembala yang dalam beberapa bulan lagi genap berusia 25 tahun. Menurutnya, *massa pontifical* di Keuskupan Agung Kupang bukanlah waktu yang Panjang tiada bertepi.

“Sebelum saya meneruskan, izinkan saya dulu juga untuk mengutip beberapa kalimat adigium latin yang bilang berkelilinglah sambil berbuat baik, Bapa Uskup. Adagium ini memiliki padanan serupa dalam kitab suci perjanjian baru Katolik kisah para rasul pasal 30 ayat 38 yang berbunyi ia berkeliling sambil berbuat baik. 25 tahun berkeliling sambil berbuat baik di wilayah Keuskupan Agung ini. Kita memberikan applause untuk itu,” ajaknya.

Namun demikian, masih banyak ikhwal yang perlu didorong untuk terus bertumbuh dan dilaksanakan dalam karya-karya pastoral Keuskupan Agung Kupang. Selama kurang lebih 25 tahun terakhir ini di bawah gembala dan penggembalaan Petrus, Keuskupan Agung Kupang telah tumbuh dan terus berkembang baik dari segi pelayanan pastoral, karya-karya karitatif, manajemen pendidikan, pembinaan bagi para calon imam biarawan dan biarwati, pembinaan pada gubernur dan wakil gubernur juga.

“Saya tadi disampaikan bahwa hari ini penutupan dari suatu pertemuan besar persiapan sinode para uskup. Saya tentu berharap agar tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi,” harapnya.

Dalam kunjungan ke Kupang, Menteri Johnny didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang; Kepala Biro Umum, Sensilous Dore; Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang, Latuse; dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi. Kunjungan Menkominfo ke Kupang kali ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya pernah berkunjung pada bulan Juni 2021. (hm.ys)







Loka Tanjung Selor

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor resmi dibuka pada tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No.15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal SDPPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian dimekarkan menjadi Provinsi

Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 sebagai provinsi ke-34 di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas $\pm 75.467.70$ km², terletak pada posisi antara 114° 35' 22' - 118° 03 00' BT dan antara 1° 21' 36' - 4° 24' 55' LU, terdiri atas empat kabupaten dan satu kotamadya yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Ibukota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia, tepatnya dengan bagian wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia.



Gbr-1. Peta Prov. Kalimantan Utara

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan sebaran penduduknya yang tidak merata menjadi salah satu faktor penyebab layanan seluler tidak merata. Saat ini wilayah Kalimantan Utara masih banyak mengalami *blank spot* jaringan seluler sehingga perangkat penguat sinyal, repeater, HT dan radio Rig menjadi solusi pilihan masyarakat untuk mempermudah komunikasinya.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah jangkauan siaran TV dan radio siaran belum

menjangkau beberapa wilayah layanannya. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah perbatasan Kalimantan Utara lebih mudah mengakses siaran TV dan radio Malaysia dibandingkan siaran dalam negeri sendiri.

Loka Monitor SFR Tanjung Selor hadir untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio dan pengukuran parameter teknis TV dan radio siaran yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara. Tujuannya agar setiap penggunaan frekuensi radio di Kalimantan Utara memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai UU RI No. 36 Tahun 1999 Pasal 33 ayat 1 dan memancar sesuai standar teknis yang telah ditentukan.

Mengawali tahun 2022, Loka Monitor SFR Tanjung Selor memulai kegiatan dengan pengukuran parameter teknis TV siaran digital di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan dalam rangka persiapan Analog Switch Off (ASO) yang terjadwal pada tanggal 30 April 2022 untuk wilayah layanan Kalimantan Utara-1 dan Kalimantan Utara-3.

Kegiatan pengukuran ini dilaksanakan untuk melihat kesesuaian parameter teknis pancaran dan Multiplexer dengan standar teknis yang ditentukan serta untuk mengetahui kuat medan pancaran di 3 (tiga) titik pengujian sesuai Permen Kominfo No.6 Tahun 2019. Selain itu juga dilakukan pengukuran parameter teknis dan kuat medan pancaran RRI Sebatik yang dilakukan di 8 (delapan) titik pengukuran wilayah layanan Sebatik.





Gbr-2. Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio

Pada tanggal 17 - 21 Januari 2022, Loka Monitor SFR Tanjung Selor melaksanakan kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio di Kota Tanjung Selor dengan melakukan pendataan langsung terhadap pengguna frekuensi radio baik yang ber-ISR maupun yang tidak ber-ISR sekaligus melakukan sosialisasi langsung kepada pengguna frekuensi tentang tata cara pengurusan ISR.

Hal ini dilakukan karena masih banyaknya pengguna frekuensi belum mengerti tentang tata cara pengurusan ISR.

Dengan sosialisasi secara personal, diharapkan dapat memacu para pengguna frekuensi agar segera mengurus izin sehingga dapat meningkatkan PNBPN sekaligus meminimalisir gangguan frekuensi radio.

Sesuai tupoksinya, Loka Monitor SFR akan senantiasa melaksanakan pemantauan penggunaan frekuensi serta pengukuran parameter teknis tv dan radio siaran untuk meningkatkan tertib penggunaan frekuensi dan mencegah terjadinya gangguan frekuensi radio di wilayah Kalimantan Utara.





Gbr-3. Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio



Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, dalam Sofa Talk Series "Rangkaian Agenda Isu Digital dalam Presidensi G20 Indonesia" yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (04/03/2022) - (AYH)

Digital Transformation Expo G20 2022, Panggung Perjalanan Transformasi Digital Indonesia

Perhelatan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menjadi momentum penting dalam mewujudkan transformasi digital nasional. Melalui Digital Economy Working Group (DEWG), Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghadirkan Digital Transformation Expo (DTE) sebagai etalase pencapaian dan usaha Indonesia dalam melakukan akselerasi transformasi digital, sekaligus untuk menarik investasi di sektor digital.

"Kita ingin menjadikan Digital Transformation Expo sebagai *showcase* perjalanan transformasi digital Indonesia. Melalui expo ini, kita akan menunjukkan kepada dunia, terutama kepada negara-negara anggota G20, Indonesia mengalami perkembangan bidang digital dengan pesat dan mampu memanfaatkannya menjadi solusi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, dalam Sofa Talk Series "Rangkaian Agenda

Isu Digital dalam Presidensi G20 Indonesia" yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (04/03/2022).

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, perjalanan panjang transformasi digital nasional memiliki daya tarik tersendiri. Pasalnya, Indonesia berhasil mencapai target pembangunan infrastruktur digital satu dekade lebih cepat, menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia.

"Perkembangan ekosistem teknologi digital saat ini jauh berbeda dari perkembangan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, ekosistem ekonomi digital Indonesia berhasil mendorong munculnya *unicorn-unicorn* baru di tengah pandemi," jelasnya.

Sekjen Mira Tayyiba yang juga bertindak sebagai Chair DEWG memaparkan bahwa pertumbuhan startup digital menjadi solusi di berbagai sektor, mulai dari e-commerce, fintech, hingga health-tech dan edu-tech.

“Cakupan transformasi digital Indonesia semakin berkembang dan luas, tidak hanya mengikuti tren tetapi benar-benar hadir sebagai solusi untuk masyarakat. Kami berharap bahwa dengan memperlihatkan keberhasilan sektor digital, Digital Transformation Expo dapat meningkatkan minat investasi negara-negara anggota G20 di Indonesia,” paparnya.

Melalui DTE, pemerintah juga menggarisbawahi besarnya potensi sektor digital di Indonesia. Oleh karena itu, dalam ajang DTE, Kementerian Kominfo melalui DEWG akan menghadirkan *experience* dan visual menggunakan teknologi terbaru.

“Kita akan mengemas DTE dengan cara yang menarik, tidak lagi menggunakan konsep expo secara konvensional,” tandasnya.

Juru Bicara Kementerian Kominfo yang juga bertindak sebagai Co-Chair DEWG, Dedy Permadi, menyatakan bahwa DTE akan diselenggarakan bersamaan dengan G20 Leaders’ Summit tanggal 15 dan 16 November 2022.

“Kami membayangkan bahwa visualisasi dalam acara DTE akan serupa dengan pengalaman memasuki taman hiburan seperti Universal Studio atau Disneyland. Untuk menciptakan *experience* tersebut dan menunjukkan perjalanan transformasi digital Indonesia, kami akan menggunakan berbagai teknologi mutakhir, termasuk di antaranya Metaverse,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat dan stakeholder terkait, DTE akan menjadi panggung bersama Indonesia sebagai kesatuan yang utuh.



“

DTE tidak akan menjadi milik Kominfo saja, tetapi menjadi panggung untuk Indonesia memperlihatkan bahwa kita adalah negara besar. Kita memiliki kekuatan berupa pertumbuhan dan perkembangan transformasi digital yang sangat signifikan, bahkan walaupun kita sedang mengalami pandemi COVID-19,” tandasnya

Juru Bicara Dedy Permadi menambahkan bahwa selain Metaverse, DTE akan menghadirkan beberapa teknologi lain yang masih dalam tahap persiapan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengajak masyarakat dan khususnya insan pers untuk ikut menyukseskan DTE.

“Kami akan mengundang rekan-rekan media untuk menyaksikan Digital Transformation Expo dan memberitakannya ke seluruh Indonesia dan dunia. Ajang ini memperlihatkan optimisme Indonesia, bahwa melalui transformasi digital, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” jelasnya.



Siapkan Infrastruktur 5G di IKN, Menkominfo Jajaki Kerja Sama Global

Pemerintah Republik Indonesia tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, salah satunya infrastruktur teknologi 5G yang telah diluncurkan secara komersial tahun 2021.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan terus menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak untuk penerapan teknologi 5G, khususnya untuk pengembangan kota pintar dan Ibu Kota Nusantara.

“Presiden Joko Widodo memiliki kebijakan yang sangat tegas dalam pengembangan TIK. Kami telah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk menjembatani kesenjangan digital di pedesaan. Pada saat yang sama, kami juga ingin menerapkan teknologi terbaru, seperti 5G,” tuturnya saat bertemu Vice President Huawei untuk Kawasan Asia-Pasifik, Jay Chen dalam rangkaian acara Mobile World Conference (MWC) 2022 di Barcelona Spanyol, Selasa (01/03/2022).

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo membangun kolaborasi penerapan teknologi 5G dengan semua pihak.

"Kami membuka peluang kerja sama dan berbagi pengetahuan dengan penyedia TIK global, termasuk Huawei," ungkapnya.

Menurut Menkominfo setelah peluncuran komersial jaringan telekomunikasi 5G tahun lalu, operator telekomunikasi telah memulai operasi awal di 13 kota di Indonesia. Bahkan, pemerintah sedang mempersiapkan spektrum frekuensi radio untuk pemerataan jaringan 5G.

"Tahun ini kami akan mengadakan lelang spektrum. Ibu Kota Negara Baru kami akan menjadi ibu kota yang didukung penuh oleh 5G. Oleh karena itu, kami perlu membangun infrastruktur TIK untuk mendukung operasi 5G di kota otonom," tandasnya.

Menkominfo menyatakan Indonesia akan memamerkan pengalaman penerapan teknologi 5G dalam KTT G20. "Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk mengembangkan transformasi digital inklusif," ungkapnya.

Dukungan



Vice President Huawei untuk Kawasan Asia-Pasifik, Jay Chen menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menkominfo ke *booth* Huawei. "Kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Huawei hall dan diskusi yang bermanfaat," ungkapnya.

Menurut Jay Chen, Indonesia merupakan salah satu mitra paling strategis Huawei dengan perkembangan ekonomi dan transformasi digital yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir.

"Indonesia berada di jalur cepat adopsi teknologi 5G, di mana implementasi dan penggunaannya secara penuh dapat menjadi *game-changer* dan solusi mendasar, baik untuk kota pintar, tata kelola, transportasi, sektor pertambangan, atau perawatan kesehatan," jelasnya.

Jay Chen menyatakan dukungan terhadap Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital. "Dengan penelitian dan pengembangan komprehensif dalam teknologi 5G sejak 2009, kami dapat mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut," tuturnya.

Vice President Huawei untuk Kawasan Asia-Pasifik menyatakan akan terus berkontribusi untuk memberikan nilai tambah ekosistem digital Indonesia, melalui penguatan infrastruktur 5G dan Cloud, penyiapan talenta digital, dan inisiatif lain.

"Ke depannya, kita bisa menjajaki lebih jauh ke dalam kolaborasi untuk mendukung perekonomian Indonesia dan industri telekomunikasi untuk melangkah lebih jauh," ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja di MWC 2022, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, Anang Latif.

Adapun Vice President, Huawei Asia Pacific, Jay Chen didampingi eksekutif senior yaitu Vice President, Huawei Asia Pacific Marketing and Solution, Jason Tao; Pakar Industri Global dan Pemerintah Grup Bisnis Perusahaan Huawei, Nadim Abdulrahim; dan CEO Grup Bisnis Jaringan & Operator Huawei Asia Pasifik, Dennis Xiao.

Sebelum bertemu dengan eksekutif Huawei, Menkominfo mengunjungi booth Huawei di venue MWC bertema "DigiTelligent Forest" yang menampilkan peluang sektor industri TIK. Dalam tur singkat itu, Menteri Johnny melihat produk dan solusi 5G untuk kasus penggunaan bisnis, jaringan seluler gigabit, "jalur cepat" jaringan *cloud*, dan solusi pengembangan hijau yang komprehensif.



Menkominfo Johnny G. Plate saat bertemu dengan perwakilan USAID, Telecom Infra Project (TIP) dan Meta Connectivity dalam rangkaian acara Mobile World Congress(MWC) 2022, Barcelona Spanyol, Selasa (01/03/2022) waktu setempat. - (Berto)

Kembangkan Ekosistem Digital, Indonesia Jalin Sinergi dengan TIP & Meta Connectivity

Pemerintah Republik Indonesia menjalin sinergi dengan Telecom Infra Project (TIP) dan Meta Connectivity untuk mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini Indonesia tengah melakukan percepatan transformasi digital dengan mengembangkan ekosistem serta talenta digital.

“Untuk memajukan pertumbuhan ekonomi digital, pengembangan talenta digital penting bagi Indonesia yang nantinya akan menjadi salah satu pilar dalam mempersiapkan Indonesia menjadi bangsa yang maju,” ujarnya usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* antara Kementerian Kominfo, Telkom University dengan TIP dan Meta Connectivity dalam rangkaian acara Mobile World Congress(MWC) 2022, Barcelona Spanyol, Selasa (01/03/2022) waktu setempat.

Menkominfo mengapresiasi sinergi Telkom-U, TIP dan Meta Connectivity dalam mengembangkan *Open Technology* dan *Metaverse Ecosystem* di Indonesia. "Sinergi ini akan mendorong industri lokal memanfaatkan teknologi metaverse dan masyarakat Indonesia akan bisa memanfaatkan metaverse," ungkapnya.

VP Connectivity Meta, Dan Rabinovitsj menyampaikan dukungan untuk kolaborasi dalam pembuatan produk dan pengembangan teknologi terbuka dan ekosistem metaverse di Indonesia.

"Saat ini yang kita perlukan adalah *Open Innovative Research* dan *Innovative Engineering*. Meta Connectivity siap dan terbuka untuk berkolaborasi dan berperan lebih jauh di Indonesia," jelasnya.

Menurut Rabinovitsj, *local manufacturing* untuk *Open RAN* dan *Open WIFI* menjadi penting dalam mengembangkan ekosistem di Indonesia.

"Meta ingin mendukung kerjasama ini dan bekerja sama bahu membahu dengan pemerintah. Meta memiliki *blue print* yang disebut *Evenstar* yang dapat digunakan sebagai acuan mendirikan *local manufacturing* untuk OpenRAN," jelasnya.

Pengembangan Talenta Digital

Director of Operation Telecom Infra Project, Rocky Bullock menjelaskan TIP dan Telkom University akan mengembangkan pelatihan dan sertifikasi program dalam mempersiapkan talenta digital. *United States Agency for International Development Officer* Kate Dimsdale menyatakan dukungan untuk pengembangan digital talent di Indonesia.

"Kami dengan senang hati akan mendukung Kominfo, TIP dan Telkom University dalam hal pengembangan pelatihan dan sertifikasi program untuk mempersiapkan digital talent di Indonesia," ungkapnya.

Rektor Telkom University (Tel-U), Adiwijaya menyambut baik kerja sama itu dan menjadi bukti bahwa Telkom University fokus pada pengembangan teknologi termasuk Metaverse.

"Kami percaya bahwa inilah saatnya bagi kita untuk bekerja sama dan bahu membahu antara Meta Connectivity, Telkom, TIP dan industri lokal untuk memastikan bahwa manfaat dari metaverse akan segera dirasakan oleh semua orang," jelasnya.

Selain pertemuan dengan beberapa perwakilan Amerika, Meta Connectivity serta TIP, pada acara yang sama juga telah dilaksanakan MoU antara Telkom University dan TIP Academy yang berfokus pada kolaborasi strategis untuk membangun digital talent di Indonesia. Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, dan Dubes Indonesia untuk Spanyol Muhammad Najib.





Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai pertemuan dengan Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (21/03/2022). - (AYH)

Tindak Lanjuti Arahannya Presiden, Menkominfo Ajak Tingkatkan Kerja Sama Siapkan Regulasi Hak Penerbit

Dalam puncak acara Peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan dukungan atas perumusan regulasi hak penerbit atau *publisher rights*. Menindaklanjuti arahan Presiden itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama penyiapan regulasi hak penerbit untuk menghadirkan konvergensi industri media di Indonesia.

"Publisher rights bukan untuk mengatasi dominasi di saat munculnya *new comer over the top*. Tapi untuk membangun satu konvergensi industri media untuk menjaga agar lapangan usaha lebih berimbang, agar bisa hidup bersama-sama, yang saling memperkuat antara konvensional media dengan *new comer over the top*," tandasnya usai pertemuan dengan Dewan Pers dan *Task Force Media Sustainability* di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (21/03/2022).

Menurut Menteri Johnny, Dewan Pers dan konstituen telah bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran untuk menyusun naskah akademik berkaitan dengan regulasi hak penerbit. Menkominfo menyatakan naskah akademik tersebut ditargetkan rampung dalam dua minggu ke depan.

“Dalam rapat bersama Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan kita bisa menyelesaikan naskah akademiknya,” ujarnya.

Dari naskah akademik tersebut, Menteri Johnny menyatakan akan mengusulkan langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta hak inisiatif mengusulkan payung hukum berkaitan dengan *publisher rights* yang relevan.

“Termasuk pilihan payung hukumnya yang paling relevan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena yang terkait dengan *publisher rights* dan digital tersebar di banyak undang-undang,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan salah satu alternatif pengaturan hak penerbit dengan mengaitkan pada payung hukum yang sudah ada. Menteri Johnny menyebutkan beberapa regulasi yang sudah ada antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Jika pilihan dalam bentuk undang-undang, tentu akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah undang-undang baru atau revisi terhadap berbagai undang-undang? Untuk sementara ini, pilihan teknis yang paling mungkin adalah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden, ini yang sedang kita *exercise draft* perundang-undangannya dalam bentuk dua payung ini,” jelasnya.

Mengenai target implementasi payung hukum *publisher rights*, Menteri Johnny menegaskan hal itu akan bergantung pada pilihan yang diusulkan. “Apakah dalam bentuk undang-undang atau peraturan turunannya. Sehingga nanti kita akan lihat payung hukum mana yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Namun itu juga yang diimplementasikan dan mempunyai landasan hukum yang kuat,” jelasnya.





Kolaborasi Media

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo menjelaskan, implementasi payung hukum *publisher right* tidak hanya menjadi kebutuhan di Indonesia. Kebutuhan itu telah menjadi fenomena global baik di Eropa, Australia, Kanada dan beberapa negara lain yang mengadopsi *publisher right* dalam konteks nasional.

"Jadi regulasi ini bukan regulasi yang menegaskan sikap *anti-platform* (digital), bukan sikap menutup diri dari transformasi digital. Tetapi untuk menciptakan sistem media yang seimbang dan setara," tandasnya.

Menurut Agus Sudibyo, jika ada kolaborasi antara media *publisher* dengan platform digital maka sejauh mungkin kolaborasi saling menguntungkan dan saling menghidupi. "Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kolaborasi ini berkontribusi besar terhadap upaya untuk membangun *good journalism*, *good content* dan ruang publik yang beradab. Selama ini ada *problem* di situ, di mana soal *liability* tanggung jawab *platform* ada beberapa pertanyaan, sekarang dengan regulasi ini coba diatur," jelasnya.





Melalui kolaborasi tersebut, Agus Sudibyo menjelaskan tentang kesetaraan perlakuan kepada industri media dan platform digital. Menurutnya, ketika industri media massa membuat kesalahan dalam pemberitaan maupun konten, maka ada undang-undang yang mengatur seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.

"Jadi intinya media massa bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar. Kami juga ingin platform global juga bertanggung jawab atas konten yang turut mereka sebar, meskipun itu bukan mereka yang membuat konten. Jadi similarity equality antara publisher dan platform ini yang ditekankan dalam undang-undang ini," ujarnya.

Agus Sudibyo menegaskan semangat implementasi publisher right ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang setara dan kondusif.

"Serta tanggung jawab yang setara dan juga kemudian bagaimana kedua belah pihak dalam kolaborasinya sama-sama berkontribusi terhadap good journalism, terhadap ruang publik yang beradab dan beretika tentu dalam konteks Indonesia ruang publik yang sesuai dengan nilai-nilai NKRI, Pancasila, dan lain-lain," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, tokoh pers yang juga Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 Bambang Harymurti, Staf Ahli Dewan Pers Shanti Ruwyastuti, Ketua Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers Syafril Nasution, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut, Pemimpin Harian Kompas Ninuk Pambudi, serta Founder dan CEO Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Prita Kemal Gani.





Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment



SALAH SATU AGENDA
DI PRESIDENSI G20
INI ADA "DEWG"
DI ACARA MEETING INI
NEGARA G20
MEMBAHAS DAN
MENGHASILKAN
KEBIJAKAN GLOBAL
UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI LEWAT
TEKNOLOGI DIGITAL.



Pemerintah Tetapkan Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia

Begini Tanggapan Maudy Ayunda

“Saya *excited*, ini momentum bersejarah. Ini kesempatan Indonesia mendorong dunia untuk pulih dan bersama-sama atasi tantangan ekonomi global. Makanya, tugas sejarah ini harus disambut sukacita dan optimis. Tidak butuh waktu lama untuk saya menyetujui sebagai bagian dari tim juru bicara pemerintah Republik Indonesia untuk Presidensi G20,”

Maudy Ayunda

Juru Bicara Pemerintah
untuk Presidensi G20 Indonesia

